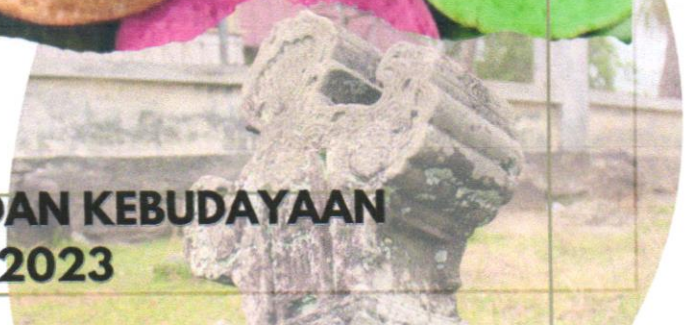
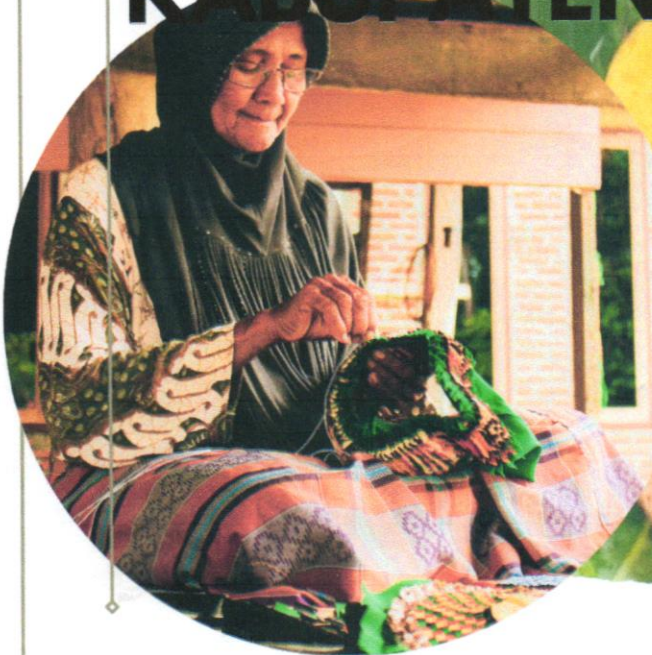




POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN PIDIE



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2023**

BAB I RANGKUMAN UMUM

Kabupaten Pidie adalah salah satu kabupaten di provinsi Aceh, Indonesia. Pusat pemerintahan kabupaten ini berada di Sigli, kabupaten ini merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar ke 2 di provinsi aceh setelah kabupaten aceh utara. Dua pertiga masyarakat kabupaten ini ada di perantauan, buat masyarakat wilayah ini merantau adalah sebuah kebiasaan yang turun temurun untuk melatih kemandirian dan keterampilan. Masyarakat wilayah ini mendominasi pasar-pasar di berbagai wilayah di provinsi Aceh dan sebagian ke provinsi sumatera utara dan negara tetangga malaysia. Selain itu, wilayah ini juga terkenal sebagai daerah asal tokoh-tokoh terkenal Aceh.

Menilik sejarah penamaan daerah ini tidak lepas dari kerajaan yang ada di daerah ini dahulu kala yaitu Kerajaan Pedir atau Kerajaan Poli sejarah Negeri Pidie / Sjahir Poli. Kerajaan ini digambarkan sebagai daerah dataran rendah yang luas dengan tanah yang subur, sehingga kehidupan penduduknya makmur. Batas-batas kerajaan ini meliputi, sebelah timur dengan Kerajaan Samudra/Pasai, sebelah barat dengan Kerajaan Aceh Darussalam, sebelah selatan dengan pegunungan, serta dengan selat Malaka di sebelah utara. Sementara dalam kisah pelayaran bangsa Portugal, Mereka menyebut Pidie sebagai Pedir, Sedangkan dalam kisah pelayaran bangsa Tiongkok disebut sebagai Poli. Asumsinya, orang Tiongkok tidak dapat menyebut kata "Pidie" seperti yang kita ucapkan. Dalam catatan pelayat Tiongkok itu disebutkan, bahwa Kerajaan Pedir luasnya sekitar seratus kali dua ratus mil, atau sekitar 50 hari perjalanan dari timur ke barat dan 20 hari perjalanan dari utara ke selatan.

Kabupaten Pidie yang membentang di antara 04,30 – 04,60 Lintang Utara dan 95,75 – 96,20 Bujur Timur merupakan salah satu kabupaten dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Wilayah Kabupaten Pidie yang terkenal dengan sebutan Krupuek Mulieng merupakan wilayah hulu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Luas wilayah Kabupaten Pidie mencapai 3.562,15 Km². wilayah Kabupaten Pidie sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Pidie Jaya, sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Aceh Besar, sebelah utara berbatasan dengan selat malaka dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat.

Secara administratif, Kabupaten Pidie terdiri dari 30 Kecamatan, 128 Kemukiman, 29 Kelurahan, dan 923 Desa, namun pada tanggal 15 Juni tahun 2007 melalui undang-undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Pidie

mengalami pemekaran menjadi 2 (dua) Kabupaten yaitu Pidie sebagai Kabupaten Induk dan Pidie Jaya sebagai Kabupaten pemekaran, sehingga saat ini wilayah Kabupaten Pidie terdiri atas 23 Kecamatan, 94 Kemukiman, 732 Gampong (yang sebelumnya 15 gampong di Kecamatan Kota Sigli, 4 di Grong-grong dan 1 di Kec.Mutiara yang sesuai dengan Qanun menjadi Kelurahan).

Sedangkan wilayah yang termasuk dalam Kabupaten Pidie Jaya merupakan wilayah bekas Kewedanaan Meureudu yang melingkupi 8 (delapan) Kecamatan (Bandar Baru, Pante Raja, Trenggadeng, Meureudu, Meurah Dua, Jangka Buya, Bandar Dua dan Ulim).

Pada sisi lain, bentuk-bentuk pelayanan yang diaktualisasikan oleh pemerintah Kabupaten tersebut akan semakin terarah dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat setempat termasuk dalam hal mengoptimalkan pemanfaatan potensi unggulan yang memiliki baik oleh Kabupaten Induk maupun Kabupaten pemekaran. Adapun rincian wilayahnya adalah sebagai berikut:

Secara demografis Kabupaten Pidie berdasarkan proyeksi 220.917 jiwa laki-laki (49,78%) + 222.801 jiwa perempuan (50,22 %) = 443.718 jiwa ; 117.592 KK. Kepadatan, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Jumlah Jiwa/KK Kepadatan 143 jiwa / Km² ; Laju pertumbuhan 2,29 % ; -+ 4 Jiwa / KK

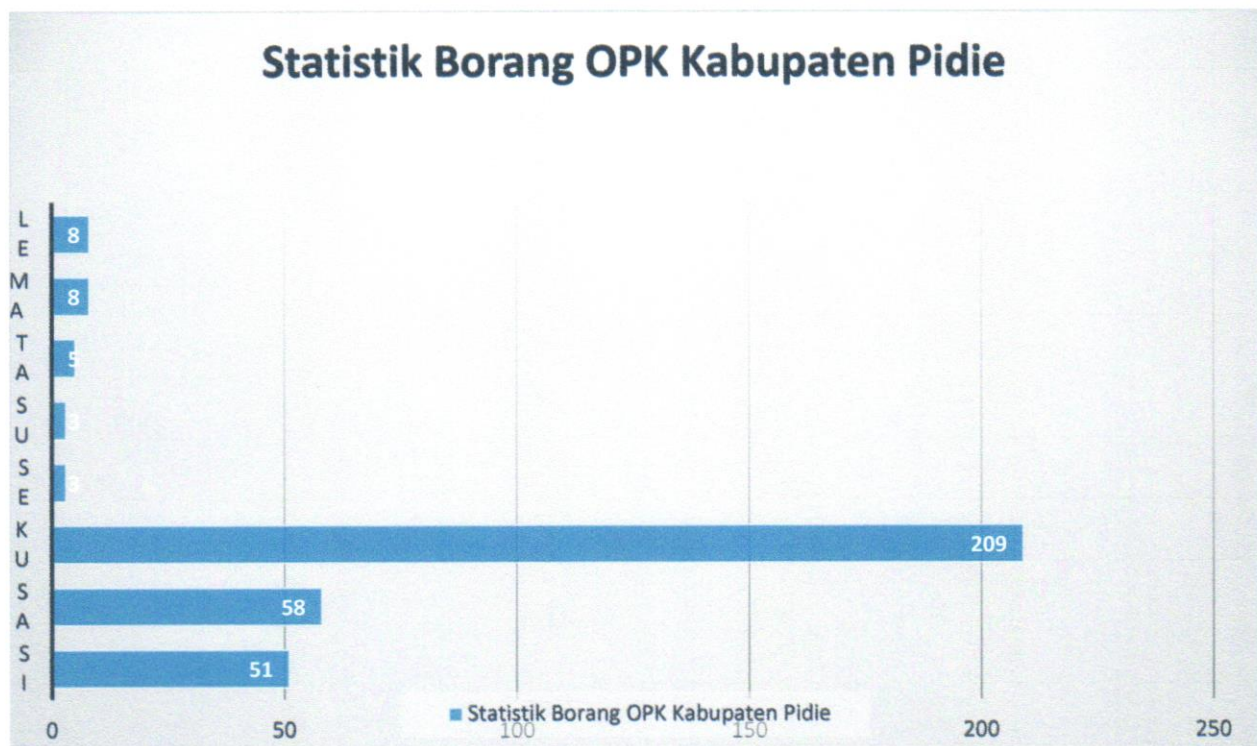
Penelusuran dan pengidentifikasian ke-11 objek kebudayaan yang menjadi pokok-pokok pikiran kebudayaan secara kontekstual sangat kompleks. Untuk itu pengkajian ini dalam proses penelitian mengoperasionalkan sejumlah metode dengan tujuan mendapatkan informasi yang valid sesuai dengan konteks objek kajian. Operasionalisasi sejumlah metode penelitian dimaksudkan untuk dapat saling mengisi dalam mendukung validasi informasi atau data yang diperoleh di lapangan, selain itu juga untuk mengatasi rentang waktu penelitian yang berlangsung singkat, kurang lebih satu bulan.

Metode penelitian yang dikembangkan di lapangan adalah, wawancara yang dilakukan kepada sejumlah informan; kajian pustaka dilakukan di 3 (tiga) tempat yakni; Perpustakaan Daerah Propinsi Aceh, Perpustakaan Daerah Kabupaten Pidie, Perpustakaan Museum Propinsi Aceh; Penelusuran Dokumen dilakukan di Museum Propinsi Aceh dan Dokumen Pribadi; Focus Group Discussin (FGD) yang melibatkan Tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, Pelaku seni dan budaya.

Dari hasil survei dan penelitian yang dilakukan, meskipun potensi objek kebudayaan

Kabupaten Pidie sangat besar, namun belum ada lembaga sekolah dan perguruan tinggi yang khusus membuka jurusan salah satu objek kebudayaan (terutama jurusan seni-budaya).

Berdasarkan hasil penelusuran yang mengacu pada instrumen borang OPK, telah teridentifikasi sejumlah jenis objek kebudayaan, mulai dari objek kebudayaan berupa; tradisi lisan; manuskrip; adat istiadat; ritus; pengetahuan tradisional; seni; bahasa; permainan rakyat; olahraga tradisional; dan cagar budaya. Secara rinci ditemukan jenis OPK bahasa terdapat 1 (satu) objek bahasa, 10 jenis objek manuskrip, 4 jenis objek adat istiadat, 1 jenis objek ritus, 2 jenis objek tradisi lisan, 2 jenis objek pengetahuan tradisional, 3 jenis objek teknologi tradisional, 6 jenis objek seni, 2 jenis objek permainan rakyat, 1 jenis objek olahraga tradisional, dan 12 jenis objek cagar budaya. Untuk lebih jelas data statistik Borang OPK Kabupaten Pidie, dapat dilihat grafik di bawah ini:



Beberapa objek kebudayaan Kabupaten Pidie yang ada, cenderung mengalami kepunahan, oleh karena semakin berkurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan lembaga kebudayaan yang aktif dalam melestarikan, membina dan mengembangkan suatu objek

kebudayaan. Objek kebudayaan yang banyak mengalami kelemahan SDM dan kelembagaan diantaranya; objek tradisi lisan yang kekurangan penutur, objek pengetahuan dan teknologi tradisional yang tergerus oleh kemajuan pengetahuan dan teknologi modern, demikian pula seni, permainan, dan olahraga tradisional. Adapun pada objek ritus kekurangan SDM pada aspek penerjemah naskah-naskah Manuskrip Kitab- Kitab.

Keseluruhan objek kebudayaan yang ada, memang secara faktual masih ada yang bertahan dan dilaksanakan, namun frekuensi pelaksanaannya sudah sangat minim oleh karena kurangnya sarana dan prasarana setiap objek kebudayaan yang ada, baik difasilitasi oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Meskipun demikian, berdasarkan hasil penelitian ditemukan data dan informasi masih terdapat sapras jenis objek kebudayaan tertentu berupa lembaga atau dewan adat, kelompok atau komunitas masyarakat, dan sapras yang disiapkan oleh pemerintah yang bersifat tentatif, seperti sapras pertunjukan dan pagelaran seni budaya, serta promosi kerajinan dan kuliner tradisional dalam setiap event seperti; Event Pekan Kebudayaan Aceh , dan Pedir Raya Festival serta event lainnya.

Problem mendasar pelestarian, pembinaan, pengembangan, dan pemajuan keseluruhan objek kebudayaan di Kabupaten Pidie, di samping faktor kesadaran internal masyarakat dalam menjaga khazanah kebudayaanya, juga tidak terlepas dari konfigurasi globalisasi, terutama dalam hal kemajuan ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi, dan perubahan gaya hidup generasi muda yang berimplikasi pada kurangnya minat, perhatian, kecintaan, dan sense of belonging terhadap nilai-nilai luhur dan budaya suku bangsanya. Oleh karena itu, upaya pemerintah Kabupaten Pidie untuk merevitalisasi nilai-nilai budaya dan adat berbasis iman dan taqwa melalui visi pembangunan ber budaya dan beradat saat ini, sangat perlu didukung dan diapresiasi oleh seluruh komponen masyarakat Kabupaten Pidie dan oleh pemerintah pusat, baik dukungan dalam bentuk moril maupun materil serta regulasi yang mendukung percepatan pemajuan kebudayaan. Dengan tersusunnya pokok pikiran kebudayaan daerah Kabupaten Pidie ini, dapat menjadi momentum untuk menyusun desain program yang lebih strategis dan produktif serta sistematis dalam pemajuan kebudayaan Indonesia, khususnya di Kabupaten Pidie.

BAB II

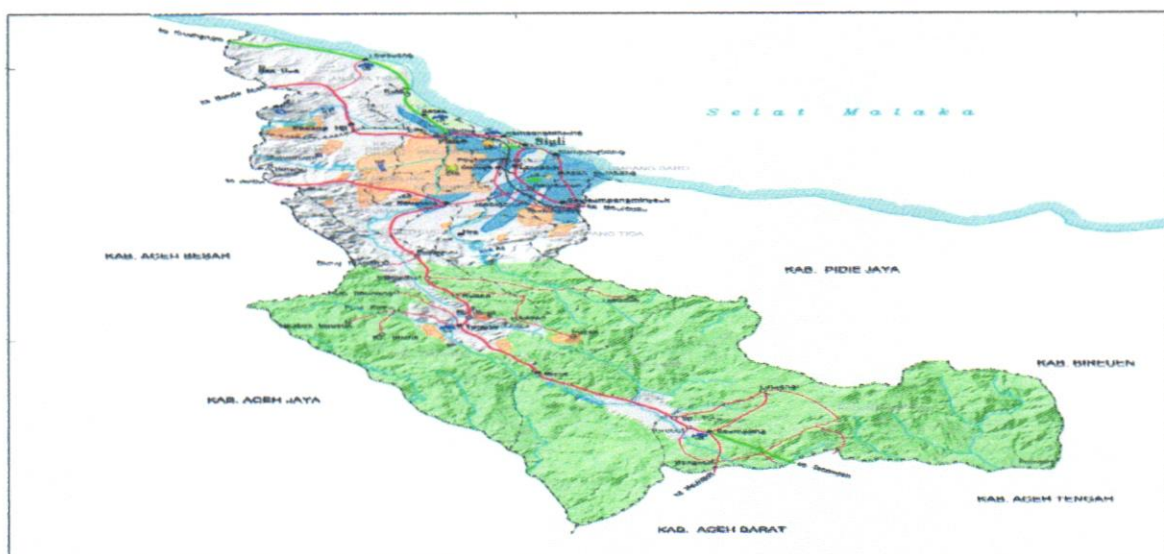
PROFIL KABUPATEN PIDIE

II.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Kabupaten Pidie adalah salah satu kabupaten di provinsi Aceh, Indonesia. Pusat pemerintahan kabupaten ini berada di Sigli, kabupaten ini merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar ke 2 di provinsi aceh setelah kabupaten aceh utara. Dua pertiga masyarakat kabupaten ini ada di perantauan, buat masyarakat wilayah ini merantau adalah sebuah kebiasaan yang turun temurun untuk melatih kemandirian dan keterampilan. Masyarakat wilayah ini mendominasi pasar-pasar di berbagai wilayah di provinsi Aceh dan sebagian ke provinsi sumatera utara dan negara tetangga malaysia. Selain itu, wilayah ini juga terkenal sebagai daerah asal tokoh-tokoh terkenal Aceh.

II.1.1. Aspek Wilayah dan Karakteristik Alam

Kabupaten Pidie yang membentang di antara 04,30 – 04,60 Lintang Utara dan 95,75 – 96,20 Bujur Timur merupakan salah satu kabupaten dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Wilayah Kabupaten Pidie yang terkenal dengan sebutan Krupuek Mulieng merupakan wilayah hulu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. wilayah Kabupaten Pidie sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Pidie Jaya, sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Aceh Besar, sebelah utara berbatasan dengan selat malaka dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat, seperti yang terlihat pada gambar peta berikut:



Secara administratif, Kabupaten Pidie terdiri dari 30 Kecamatan, 128 Kemukiman, 29 Kelurahan, dan 923 Desa, namun pada tanggal 15 Juni tahun 2007 melalui undang-undang

Nomor 7 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Pidie mengalami pemekaran menjadi 2 (dua) Kabupaten yaitu Pidie sebagai Kabupaten Induk dan Pidie Jaya sebagai Kabupaten pemekaran, sehingga saat ini wilayah Kabupaten Pidie terdiri atas 23 Kecamatan, 94 Kemukiman, 732 Gampong (yang sebelumnya 15 gampong di Kecamatan Kota Sigli, 4 di Grong-grong dan 1 di Kec.Mutiara yang sesuai dengan Qanun menjadi Kelurahan , Sedangkan wilayah yang termasuk dalam Kabupaten Pidie Jaya merupakan wilayah bekas Kewedanaan Meureudu yang melingkupi 8 (delapan) Kecamatan (Bandar Baru, Pante Raja, Trenggadeng, Meureudu, Meurah Dua, Jangka Buya, Bandar Dua dan Ulim).

Secara persentase luas wilayah setiap kecamatan yang ada di kabupaten pidie dapat dilihat pada table berikut in;

No.	Kecamatan/Sub District	Luas Wilayah/Area (Km2)	Persen (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Geumpang	594,64	16.69
2	Mane	817.50	22.95
3	Glumpang Tiga	59.70	1.68
4	Glumpang Baro	45.30	1.27
5	Mutiara	35.05	0.98
6	Mutiara Timur	63.55	1.78
7	Tiro/Truseb	255.00	7.16
8	Tangse	750.00	21.05
9	Keumala	27.57	0.77
10	Titeue	20.11	0.56
11	Sakti	70.03	1.97
12	Mila	21.32	0.60
13	Padang Tiji	258.71	7.26
14	Delima	43.89	1.23
15	Grong-grong	19.41	0.54
16	Indrajaya	34.02	0.96
17	Peukan Baro	30.00	0.84
18	Kembang Tanjong	46.50	1.31
19	Simpang Tiga	55.36	1.55
20	Kota Sigli	9.75	0.27

21	Pidie	38.00	1.07
22	Batee	104.74	2.94
23	Muara Tiga	162.00	4.55
Jumlah/Total		3.562,15	100.00

Dari table diatas jelas terlihat bahwa luas wilayah terbesar pertama adalah kecamatan mane seluas 817,50 km2, selanjutnya luas wilayah yang kedua adalah kecamatan tangse seluas 750 km2 dan luas wilayah yang ketiga adalah kecamatan geumpang dengan luas 594,64 km2

II.1.2. Demografi

Kabupaten Pidie memiliki jumlah penduduk 444,149 (Jumlah Jenis Kelamin Laki 220.707 Jiwa, Jumlah Jenis Perempuan 223.442 Jiwa). Jumlah Kepala Keluarga 130.178 Kepala Keluarga (Jumlah KK Jenis Kelamin Laki 94.350 KK, Jumlah Jenis KK Perempuan 36.388 KK) Keadaan tahun 2020.

II.1.3. Latar Belakang Budaya

Asimilasi kebudayaan Arab, India, China dan Budaya Lokal

II.1.3.1. Corak Utama

Corak budaya yang dominan di Kabupaten Pidie adalah Budaya Gotong- royong atau mengerjakan suatu hal secara bersama- sama untuk kemaslahatan masyarakat. Contoh nyataialah Khanduri laot, Khanduri Blang, serta perayaan adat istiadat lainnya.

II.1.3.2. Keragaman Budaya

Keragaman Budaya Kabupaten Pidie memiliki beberapa ekspresi yang masih asli khusus Ritual yang masih berlaku di masyakat hingga kini dan tidak dimiliki kebudayaan lain di Indonesia. Tak pelak lagi di kabupaten pidie sering dilaksanakan acara Khanduri atau perayaan sesuatu hal yang jarang di jumpai di daerah lain dalam lingkup Provinsi Aceh

II.1.4. Sejarah

Kabupaten Pidie menurut sejarah tidak lepas dari keberadaan Kerajaan Pedir Sejarawan Aceh, M. Junus Jamil di dalam bukunya yang berjudul “Silsilah Tawarick Radja- Radja Kerajaan Aceh”, berisi tentang sejarah Negeri Pidie / Sjahir Poli. Kerajaan ini digambarkan sebagai daerah dataran rendah yang luas dengan tanah yang subur, sehingga

kehidupan penduduknya makmur. Batas-batas kerajaan ini meliputi, sebelah timur dengan Kerajaan Samudra/Pasai, sebelah barat dengan Kerajaan Aceh Darussalam, sebelah selatan dengan pegunungan, serta dengan selat Malaka di sebelah utara. Sementara dalam kisah pelayaran bangsa Portugal, Mereka menyebut Pidie sebagai Pedir, Sedangkan dalam kisah pelayaran bangsa Tiongkok disebut sebagai Poli. Asumsinya, orang Tiongkok tidak dapat menyebut kata “Pidie” seperti yang kita ucapkan. Dalam catatan pelayat Tiongkok itu disebutkan, bahwa Kerajaan Pedir luasnya sekitar seratus kali dua ratus mil, atau sekitar 50 hari perjalanan dari timur ke barat dan 20 hari perjalanan dari utara ke selatan. Menurut M. Junus Jamil, Suku yang mendiami kerajaan ini berasal dari Mon Khmer yang datang dari Asia Tenggara yakni dari Negeri Campa. Suku Mon Khmer itu datang ke Poli beberapa abad sebelum masehi. Rombongan ini dipimpin oleh Sjahir Pauling yang kemudian dikenal sebagai Sjahir Poli. Mereka kemudian berbaur dengan masyarakat sekitar yang telah lebih dahulu mendiami kawasan tersebut.

Setelah berlabuh dan menetap di kawasan itu, Sjahir Poli mendirikan sebuah kerajaan yang dinamai Kerajaan Sama Indra. Waktu itu mereka masih menganut agama Budha Mahayana atau Himayana. Oleh M Junus Djamil diyakini dari agama ini kemudian masuk pengaruh Hindu. Lama kelamaan Kerajaan Sama Indra pecah mejadi beberapa kerajaan kecil. Seperti pecahnya Kerajaan Indra Purwa (Lamuri) menjadi Kerajaan Indrapuri, Indrapatra, Indrapurwa dan Indrajaya yang dikenal sebagai kerajaan Panton Rie atau Kantoli di Lhokseudu. Kala itu Kerajaan Sama Indra menjadi saingan Kerajaan Indrapurba (Lamuri) di sebelah barat dan kerajaan Plak Plieng (Kerajaan Panca Warna) di sebelah timur. Kerajaan Sama Indramengalami goncangan dan perubahan yang berat kala itu, Menurut M Junus Djamil, pada pertengahan abad ke-14 masehi penduduk di Kerajaan SamaIndra beralih dari agama lama menjadi pemeluk agamaIslam, setelah kerajaan itu diserang oleh Kerajaan Aceh Darussalam yang dipimpin Sultan Mansyur Syah (1354 – 1408 M). Selanjutnya, pengaruh Islam yang dibawa oleh orang-orang dari Kerajaan Aceh Darussalam terus mengikis ajaran hindu dan budha di daerah tersebut. Setelah kerajaan Sama Indra takluk pada Kerajaan Aceh Darussalam, makan sultan Acehselanjutnya, Sultan Mahmud II Alaidin Johan Sjah mengangkat Raja Husein Sjah menjadi sultan muda di negeri Sama Indra yang otonom di bawah Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Sama Indra kemudian berganti nama menjadi Kerajaan Pedir, yang lama kelamaan berubah menjadi Pidie seperti yang dikenal sekarang. Meski sebagai kerajaan otonom di bawah Kerajaan Aceh Darussalam, peranan raja negeri Pidie tetap dipererhitungkan. Malah, setiap keputusan Majelis Mahkamah Rakyat KerajaanAceh Darussalam, sultan tidak memberi cap geulanteu (stempel halilintar) sebelum

mendapat persetujuan dari Laksamana Raja Maharaja Pidie. Maha Raja Pidie beserta uleebalang syik dalam Kerajaan Aceh Darussalam berhak mengatur daerah kekuasaannya menurut putusan balai rakyat negeri masing-masing.

Sementara Prof. D. G. E Hall dari Inggris, dalam bukunya "A History of South East Asia", menggambarkan Pidie sebagai sebuah negeri yang maju pada akhir abad ke 15. Hal itu berdasarkan catatan seorang pelawat Portugal, Ludovico di Varthema, yang pernah singgah di Pidie pada akhir abad 15. Dalam catatan Varthema, sebagaimana dikutip Muhammad Said (Pengarang Buku Aceh Sepanjang Abad) dalam "Wajah Aceh dalam Lintasan Sejarah" padaabad tersebut Pedir, yang masih disebut sebagai negeri Pedir merupakan sebuah negeri maju yang setiap tahunnya disinggahi sekurang-kurangnya 18 sampai 20 kapal asing, untuk memuat lada yang selanjutnya diangkut ke Tiongkok, Cina. Dari pelabuhan Pedir juga diekspor kemenyan dan sutra produksi masyarakat Pidie dalam jumlah besar. Karena itu pula, banyak pendatang dari bangsa asing yang berdagang ke pelabuhan Pedir. Hal ini mengakibatkan pertumbuhan ekonomi warga pelabuhan waktu itu meningkat. Bahkan varthema menggambarkan, disebuah jalan dekat pelabuhan Pedir, terdapat sekitar 500 orang penukar mata uang asing. "So extensive was its trade, and so great the number of merchants resorting there, that one of its street contain about 500 honderd moneychanger," kata Varhtema. Varthema oleh Muhammad Said disebutkan sama seperti Snouck Horgronje, yang Islam untuk sebuah tujuan penelitian tentan dunia muslim. Sebelum ke Pedir, ia juga telah mempelajari Islam di Mekkah. Sesuatu yang kemudian juga dilakukan Snouck Hourgronje dari Belanda, tetapi Snouck lebih terkenal ketimbang Varthema, karena berhasil menulis sejumlah buku tentang Aceh. Dalam catatannya Varthema mengatakan takjub terhadap negeri Pedir yang saat itu sudah menggunakan uang emas, perak, dan tembaga sebagai alat jual beli, serta aturan hukum yang sudah berjalan dengan baik, yang disebutnya "Strict Administration of Justice,".

Selain itu Varthema juga menulis tentang kapal-kapal besar milik nelayan yang disebut tongkang, yang menggunakan dua buah kemudi. Ia juga mengupas secara terperinci tentang keahlian rakyat Pedir tentang perindustrian kala itu, yang sudah mampu membuat alat-alat peletup atau senjata api. Dalam sebuah riwayat Tiongkok (Cina) disebutkan, pada tahun 413 Masehi, seorang musafir Tiongkok, Fa Hian melawat ke Yeep Po Ti dan singgah Poli (Pidie- red). Fa Hian menyebutkan Poli sebagai sebuah negeri yang makmur, yang rajanya berkendaraangajah, berpakaian sutra dan bermahkota emas.

Untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Cina, Raja Poli pada tahun 518 Masehi

mengirim utusannya ke Tiongkok. Hubungan itu terus berlanjut. Pada tahun 671 Masehi, I Tsing dari Tiongkok melawat ke Poli. Ia disebut tinggal selama lima tahun singgah dan tinggal di enam kerajaan di pesisir Sumatera, mulai dari Kerajaan Lamuri (Aceh Besar), Poli (Pidie), Samudra dan Pasai (Aceh Utara), Pereulak (Aceh Timur) dan kerajaan Dangroian.

Poli sebagai Pidie yang dikenal sekarang, menurut H. M Zainuddin dalam bukunya "Tarikh Aceh dan Nusantara" disebutkan oleh ahli sejarawan kuno, Winster, sebagai sebuah negeri yang makmur dan jaya. Menurutnya, setelah Sriwijaya dan Pasai, Poli lah Bandar pelabuhan yang terkenal. Pelabuhan Poli disebut-sebut berbentuk genting, yang oleh H M Zainuddin kemudian diduga sebagai sebuah muara yang kini dikenal sebagai Kuala Batee. Menurut Varthema sumber Portugis mengatakan bahwa Sultan Ma'ruf Syah Raja Pidie (Pedir, Sjir, Duli) itu pernah menaklukkan Aceh Besar dalam tahun 1479. Masa itu diangkat dua orang wakil di Aceh, seorang di Aceh sendiri dan seorang di Daya. Mula-mula Pidie dikalahkan oleh Raja Aceh Besar dan di dudukkan oleh Wali Negara (Gubernur) di Pidie, yaitu Raja Ali dan adiknya, Ibrahim. Kemudian Raja Ibrahim yang menjadi Wali Negara Raja Aceh di Pidie atas Perintah abangnya menyerbu Benteng Portugis yang baru didirikan di Kuala Gigieng. Cerita lain menyebutkan bahwa, Kuta Asan, Pidie, merupakan bekas kota yang didirikan Portugis.

Selanjutnya dengan senjata yang dirampas dari Portugis, Raja Pidie menyerang Raja Aceh Besar pada tahun 1514 dan Sultan Salahuddin Ibnu Muzaffar Syah diturunkan dari takhta. Raja Ali naik menjadi raja dengan Gelar Sultan Ali Mughayat Syah, sedang adiknya Raja Ibrahim menjadi Laksamana.

II.1.4.1. Sejarah Singkat Budaya

Dengan letak Pusat Pemerintahan dan keramaian orang di pesisir kebudayaan di kabupaten pidie tidak lepas dari hasil asimilasi budaya pendatang contohnya adat istiadat perkawinan, tarian, alat musik, dan kuliner. Banyak diantaranya terinfluensi dari daerah India, Arab dan China.

Dalam sebuah riwayat Tiongkok (Cina) disebutkan, pada tahun 413 Masehi, seorang musafir Tiongkok, Fa Hian melawat ke Yeep Po Ti dan singgah Poli (Pidie-red). Fa Hian menyebutkan Poli sebagai sebuah negeri yang makmur, yang rajanya berkenderaan gajah, berpakaian sutra dan bermahkota emas.

Untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Cina, Raja Poli pada tahun 518 Masehi

mengirim utusannya ke Tiongkok. Hubungan itu terus berlanjut. Pada tahun 671 Masehi, I Tsing dari Tiongkok melawat ke Poli. Ia disebut tinggal selama lima tahun singgah dan tinggal di enam kerajaan di pesisir Sumatera, mulai dari Kerajaan Lamuri (Aceh Besar), Poli (Pidie), Samudra dan Pasai (Aceh Utara), Pereulak (Aceh Timur) dan kerajaan Dangroian.

Poli sebagai Pidie yang dikenal sekarang, menurut H. M Zainuddin dalam bukunya "Tarikh Aceh dan Nusantara" disebutkan oleh ahli sejarawan kuno, Winster, sebagai sebuah negeri yang makmur dan jaya. Menurutnya, setelah Sriwijaya dan Pasai, Poli lah Bandar pelabuhan yang terkenal. Pelabuhan Poli disebut-sebut berbentuk genting, yang oleh H M Zainuddin kemudian diduga sebagai sebuah muara yang kini dikenal sebagai Kuala Batee.

Menurut Varthema sumber Portugis mengatakan bahwa Sultan Ma'ruf Syah Raja Pidie (Pedir, Sjur, Duli) itu pernah menaklukkan Aceh Besar dalam tahun 1479. Masa itu diangkat dua orang wakil di Aceh, seorang di Aceh sendiri dan seorang di Daya. Mula-mula Pidie dikalahkan oleh Raja Aceh Besar dan di dudukkan oleh Wali Negara (Gubernur) di Pidie, yaitu Raja Ali dan adiknya, Ibrahim.

Kemudian Raja Ibrahim yang menjadi Wali Negara Raja Aceh di Pidie atas Perintah abangnya menyerbu Benteng Portugis yang baru didirikan di Kuala Gigieng. Cerita lain menyebutkan bahwa, Kuta Asan, Pidie, merupakan bekas kota yang didirikan Portugis.

Selanjutnya dengan senjata yang dirampas dari Portugis, Raja Pidie menyerang Raja Aceh Besar pada tahun 1514 dan Sultan Salahuddin Ibnu Muzaffar Syah diturunkan dari takhta. Raja Ali naik menjadi raja dengan Gelar Sultan Ali Mughayat Syah, sedang adiknya Raja Ibrahim menjadi Laksamana.

Silsilah Raja-Raja / Pemimpin Pemerintahan Pidier / پدر saat itu

1. Maharaja Sulaiman Noer: Anak Sultan Husein Syah.
2. Maharaha Sjamsu Syah: Kemudian menjadi Sultan Aceh.
3. Maharaja Malik Ma'roef Syah: Putra dari Maharaja Sulaiman Noer. Mangkat pada tahun 1511 M, dikuburkan di Klibeut di sisi kuburan ayahnya.
4. Maharaja Ahmad Sjah: Putra Maharaja Ma'roef Syah. Pernah berperang melawan Sulthan Ali Mughayat Syah, tapi kalah. Mangkat pada tahun 1520 M, dikuburkan di Klibeut di sisi kuburan ayahnya.
5. Maharaja Husain Syah: Putra Sultan Riayat Syah II (Meureuhom Khaa), kemudian menggantikan ayahnya menjadi Sulthan Aceh.

6. Maharaja Saidil Mukamil: Putra dari Maharaja Firman Syah, kemudian menjadi Sulthan Aceh dari 1589 sampai 1604 M. Ayah dari ibu Sulthan Iskandar Muda.
7. Maharaja Husain Syah: Putra dari Sulthan Saidil Mukamil.
8. Maharaja Meurah Poli: Meurah Poli Negeri Keumangan dikenal sebagai Laksamana Panglima Pidie yang terkenal dalam perang Malaka (Pran Raja Siujud).
9. Maharaja Po Meurah: Syahir Poli, Bentara IX Mukim Keumangan yang bergelar Pang Ulee Peunaroo. Pengatur negeri Pidie.
10. Meurah Po Itam : Bentara Kumangan bergelar Pang Ulee Peunaroo.
11. Meurah Po Puan : Bentara keumangan bergelar Pang Ulee peunaroo.
12. Meurah Po Thahir : Bentara Keumangan yang terkenal dalam perang Pocut Muhammad dengan Potue Djemaloiy (Sulthan Djamalul Alam Badrul Munir) pada Tahun 1740 M. Ia mempunyai dua orang saudara: Meurah Po Doom dan Meurah Po Djoho.
13. Meurah Po Seuman: Pang Ulee Peunaroo dengan nama asli Usman.
14. Meurah Po Lateh: Pang Ule peunaroo dengan nama asli Abdul Latif, terkenal dengan sebutan Keumangan Teungeut.
15. Teuku Keumangan Yusuf: Sudah masuk masa perang Aceh dengan Belanda.
16. Teuku Keumangan Umar: Uleebalang IX Mukim, Pidie.

II.1.4.2. Sejarah Singkat Wilayah Administratif

Sejarawan Aceh, M. Junus Jamil di dalam bukunya yang berjudul “Silsilah Tawarick Radja-Radja Kerajaan Aceh”, berisi tentang sejarah Negeri Pidie / Sjahir Poli. Kerajaan ini digambarkan sebagai daerah dataran rendah yang luas dengan tanah yang subur, sehingga kehidupan penduduknya makmur. Batas-batas kerajaan ini meliputi, sebelah timur dengan Kerajaan Samudra/Pasai, sebelah barat dengan Kerajaan Aceh Darussalam, sebelah selatan dengan pegunungan, serta dengan selat Malaka di sebelah utara. Sementara dalam kisah pelayaran bangsa Portugal, Mereka menyebut Pidie sebagai Pedir, Sedangkan dalam kisah pelayaran bangsa Tiongkok disebut sebagai Poli. Asumsinya, orang Tiongkok tidak dapat menyebut kata “Pidie” seperti yang kita ucapkan. Dalam catatan pelayat Tiongkok itu disebutkan, bahwa Kerajaan Pedir luasnya sekitar seratus kali dua ratus mil, atau sekitar 50 hari perjalanan dari timur ke barat dan 20 hari perjalanan dari utara ke selatan.

Menurut M. Junus Jamil, Suku yang mendiami kerajaan ini berasal dari Mon Khmer yang datang dari Asia Tenggara yakni dari Negeri Campa. Suku Mon Khmer itu datang ke Poli beberapa abad sebelum masehi. Rombongan ini dipimpin oleh Sjahir Pauling yang kemudian

dikenal sebagai Sjahir Poli. Mereka kemudian berbaur dengan masyarakat sekitar yang telah lebih dahulu mendiami kawasan tersebut.

Setelah berlabuh dan menetap di kawasan itu (Pidie-red), Sjahir Poli mendirikan sebuah kerajaan yang dinamai Kerajaan Sama Indra. Waktu itu mereka masih menganut agama Budha Mahayana atau Himayana. Oleh M Junus Djamil diyakini dari agama ini kemudian masuk pengaruh Hindu.

Lama kelamaan Kerajaan Sama Indra pecah mejadi beberapa kerajaan kecil. Seperti pecahnya Kerajaan Indra Purwa (Lamuri) menjadi Kerajaan Indrapuri, Indrapatra, Indrapurwa dan Indrajaya yang dikenal sebagai kerajaan Panton Rie atau Kantoli di Lhokseudu.

Kala itu Kerajaan Sama Indra menjadi saingan Kerajaan Indrapurba (Lamuri) di sebelah barat dan kerajaan Plak Plieng (Kerajaan Panca Warna) di sebelah timur. Kerajaan Sama Indramengalami guncangan dan perubahan yang berat kala itu, Menurut M Junus Djamil, pada pertengahan abad ke-14 masehi penduduk di Kerajaan SamaIndra beralih dari agama lama menjadi pemeluk agama Islam, setelah kerajaan itu diserang oleh Kerajaan Aceh Darussalam yang dipimpin Sultan Mansyur Syah (1354 - 1408 M). Selanjutnya, pengaruh Islam yang dibawa oleh orang-orang dari Kerajaan Aceh Darussalam terus mengikis ajaran hindu dan budha di daerah tersebut.

Setelah kerajaan Sama Indra takluk pada Kerajaan Aceh Darussalam, makan sultan Acehselanjutnya, Sultan Mahmud II Alaidin Johan Sjah mengangkat Raja Husein Sjah menjadi sultan muda di negeri Sama Indra yang otonom di bawah Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Sama Indra kemudian berganti nama menjadi Kerajaan Pedir, yang lama kelamaan berubah menjadi Pidie seperti yang dikenal sekarang.

II.2. Ringkasan Proses Penyusunan PPKD

II.2.1. Tim Penyusun

Anggota Tim penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Pidie berasal dari berbagai unsur, di antaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie, Akademisi, Praktisi Seni dan Budaya, Tokoh Masyarakat. Adapun susunan anggota tim sebagai berikut:

Tabel 2
Susunan Tim Penyusun PPKD Kabupaten Pidie Tahun 2023

No	Nama	Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim
1	Ir. Wahyudi Adisiswanto, M.Si	Pj Bupati Pidie	Pembina
2	Idhami, S. Sos, M. Si	Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie	Pembina
3	Drs. Smsul Azhar	Asisten Pemerintah, Ke Istimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Pidie	Pengarah
4	Isnaini, ST, M.Si	Kepala BAPPEDA Kab. Pidie	Pengarah
5	Yusmadi, S.Pd, M.Pd	Kadis Pendidikan Dan kebudayaan Kab. Pidie	Ketua
6	Malia Safriani, S.Pd, M.Pd	Sekdis Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pidie	Wakil Ketua
7	Mahdiana, S. Pd	Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pidie	Sekretaris
8	Teuku Hendra	Kepala BPKK Pidie	Anggota
9	Dra. Mardaini	Kabid Perindustrian Disperindagkop Kab. Pidie	Anggota
10	H. Bukhari Tahir	MPD Kab. Pidie	Anggota
11	Tgk H. Athailah	Ketu MAA Kab. Pidie	Anggota
12	Junaidi Ahmad	Budayawan	Anggota
13	Muhajir	Pemerhati Cagar Budaya	Anggota
14	Aris Munandar	Ketua DKA Pidie	Anggota
15	Drs. Sufyan, M.Pd	Pengelola Data Perfilman	Anggota
16	Rahmat, S.Pd.I	Penggiat Budaya kab. Pidie	Anggota
17	Khalid Muttaqin	Komunitas Beulangang Tanoh (Komunitas Budaya)	Anggota
18	Iwan	Sanggar Seni Pusaka Nanggroe	Anggota

II.2.2. Proses Pendataan

Proses pendataan yang dilakukan oleh Tim PPKD Kabupaten Pidie dilakukan

berdasarkan metode penelitian yang telah dijelaskan pada sub bab metode penelitian. Beragamnya metode penelitian yang dioperasionalkan dalam kajian ini didasarkan pada kompleksitas 11 pokok pikiran pemajuan kebudayaan Kabupaten Pidie. Secara umum tim yang terbentuk menggunakan wawancara, kajian literatur, penelusuran dokumen, dan Focus Group Discussion (FGD).

Seluruh tim menggunakan metode Wawancara terhadap setiap informan dengan menerapkan metode Jemput Bola. Dalam proses wawancara setiap tim informan diwawancara langsung, di antaranya tokoh masyarakat, tokoh adat, budayawan, pelaku seni budaya dan masyarakat umum yang dianggap memiliki pengetahuan terkait 11 objek pemajuan kebudayaan; Kajian literatur dilakukan di Perpustakaan Propinsi Aceh, Perpustakaan Daerah Kabupaten Pidie dan Perpustakaan Museum Propinsi Aceh; Penelusuran Dokumen dilakukan di Museum Daerah Aceh dan dokumen terkait yang terdapat pada masyarakat; Focuss Group Discussion (FGD) melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat, budayawan, pelaku seni budaya, pihak pemerintah daerah Kabupaten Pidie dengan cara membentuk kelompok kecil berdasarkan setiap pokok pikiran. Setiap orang dari peserta FGD dimasukkan ke dalam kelompok berdasarkan pengetahuan dan perhatian.

II.2.3. Proses Penyusunan Masalah dan Rekomendasi

Penyusunan masalah dan rekomendasi dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan: Pertama, Identifikasi masalah melalui wawancara terbuka terhadap setiap informan atas setiap jenis dari 11 Objek Pemajuan Kebudayaan; tahap Kedua, Masalah yang muncul pada tahap pertama didiskusikan oleh setiap peserta FGD untuk setiap kelompok objek pemajuan dan merumuskan secara kolektif rekomendasi; dan tahap Ketiga, Masalah dan rekomendasi yang telah dirumuskan melalui FGD dimatangkan oleh Tim penyusun baik dalam konteks kebahasaan dan konten dari rekomendasi dan masalah.

II.2.4. Catatan Evaluasi atas Proses Penyusunan

Sebagai implikasi dari keseluruhan proses penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten Pidie Tahun 2023 ini, maka ada beberapa catatan-catatan evaluasi dari Tim kerja, sebagai berikut:

a. Aspek Personal dan Tanggung Jawab Kinerja Tim Penyusun:

- 1) Pembentukan tim penyusun hendaknya dilibatkan dari kolaborasi berbagai bidang keahlian terkait dibutuhkan dalam proses penelitian, penginputan, dan pengolahan

serta analisis data sehingga terjadi sinergitas tim secara efektif dan produktif dalam menyelesaikan proses penyusunan PPKD.

- 2) Tim penyusun memiliki kesibukan masing-masing sehingga progres kerja penyusunan kurang maksimal dan kurang produktif diakibatkan beberapa anggota tim tidak hadir dalam rapat-rapat koordinasi dan konsolidasi penyusunan PPKD.
- 3) Koordinasi kinerja dan tanggungjawab tugas masing-masing tim penyusun yang dibangun melalui jalur komunikasi medsos terkadang kurang responsif dari anggota tim, menyebabkan diskusi dan proses pemecahan masalah setiap kendala proses kerja penyusunan menjadi lambat dan terganggu.

b. Aspek Waktu dan Prosedur Penyusunan:

- 1) Limit waktu penyusunan PPKD sangat singkat dan terbatas, sehingga pelaksanaan survei, pengumpulan data, pendalaman setiap objek PPKD belum maksimal.
- 2) Beberapa masukan terkait tahapan-tahapan kinerja penyusunan dari beberapa tim yang efektif kurang diakomodir, sehingga target dan capaian kerja penyusunan kurang sesuai target yang direncanakan.
- 3) Sistem kerja penyusunan tidak tersusun secara sistemik dan terukur dalam bentuk time schedule.

c. Proses Pengumpulan dan Pengimputan Data OPK:

- 1) Pengumpulan data dan survei setiap OPK masih terdapat di antaranya yang tidak berbasis atau mengacu pada borang dan juknis penyusunan OPK, sehingga berdampak pada proses kelengkapan penginputan di dalam APIK.
- 2) Keterlambatan proses input data setiap OPK ke dalam APIK berdampak terhadap proses analisis grafik dan tabel di dalam draft PPKD.

d. Fasilitasi dan Publikasi Proses Penyusunan:

- 1) Tim tidak difasilitasi dengan alat transportasi dan akomodasi yang memadai untuk turun survei dan pendalaman di lapangan terkait kebutuhan data dan informasi setiap OPK yang akan dikaji.
- 2) Penguatan anggaran terkait dengan keperluan penyusunan dan proteksi kinerja tim penyusun masih sangat terbatas sehingga perlu perencanaan keuangan terkait rencana

penyusunan yang rasional, terukur, dan proporsional, serta berbasis profesionalitas.

- 3) Sistem publikasi belum maksimal sehingga banyak masyarakat tidak mengetahui adanya penyusunan PPKD, sehingga masyarakat luas kurang terlibat dalam memberikan data dan informasi terkait dengan OPK Kabupaten Pidie.

Beberapa catatan di atas, sekaligus sebagai rekomendasi agar langkah penyusunan tindak lanjut dapat berjalan secara efektif dan maksimal dalam rangka tersusunnya PPKD dan desain program-program strategis pemajuan kebudayaan Kabupaten Pidie secara berkualitas.

BAB III

LEMBAGA PENDIDIKAN BIDANG KEBUDAYAAN

III.1. Lembaga Pendidikan Menengah Bidang Kebudayaan

Secara spesifik, belum ada lembaga pendidikan menengah yang memiliki jurusan khusus di bidang kebudayaan atau sekolah yang khusus di bidang seni budaya.

III.2. Lembaga Pendidikan Tinggi Bidang Kebudayaan

Di kabupaten Pidie terdapat dua Lembaga Pendidikan tinggi yaitu Universitas Jabal Ghafur (UNIGHA) dan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal Sigli (STIT Al-Hilal) akan tetapi tidak memiliki jurusan khusus yang membidangi kebudayaan namun demikian, memiliki jurusan yang berhubungan dengan kebudayaan seperti; jurusan FKIP Sejarah, Jurusan FKIP Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di UNIGHA;

BAB IV

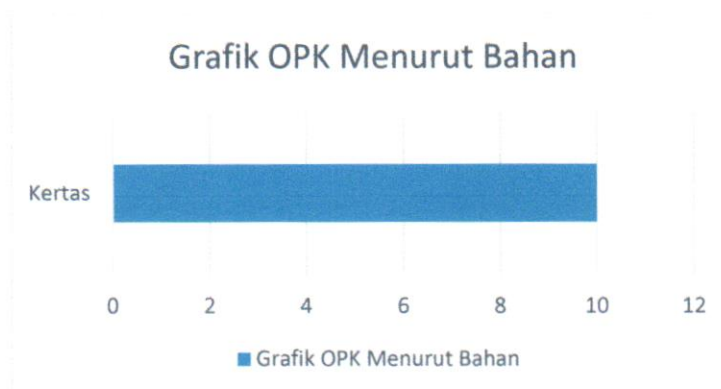
DATA OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN

IV.1. Manuskrip

Manuskrip adalah semua bahan tulisan tangan peninggalan nenek moyang pada kertas, lontar, kulit kayu, dan sebagainya. Terdapat beberapa manuskrip skrip (naskah) kuno yang selama ini tersimpan di penjuru tanah air, sejatinya merupakan sumber peradaban tak ternilai. Manuskrip merupakan sumber pengetahuan yang masih relevan sampai kini, selain nilai-nilai kehidupan. Khusus di Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, berdasarkan hasil pendataan dan survei terdapat 10 manuskrip, sebagai berikut:

No.	Nama OPK Manuskrip	Bahasa
1.	Kitab Fiqh Bidayah	Bahasa Arab, bahasa jawi dan jawi aceh
2.	Kitab Ilmu Tauhid	Bahasa Arab, bahasa jawi dan jawi aceh
3.	Kitab Masailalilmuhtadin	Bahasa Arab, bahasa jawi dan jawi aceh
4.	Kitab Nawhu Sharaf (Tata Bahasa	Bahasa Arab, bahasa jawi dan jawi aceh
5.	Kitab Nazam Aceh, Melayu, Arab	Bahasa Arab, bahasa jawi dan jawi aceh
6.	Kitab Nazam dan Perukunan	Bahasa Arab, bahasa jawi dan jawi aceh
7.	Kitab Obat- Obatan dan Ruqyah	Bahasa Arab, bahasa jawi dan jawi aceh
8.	Kitab Sirathal Mustaqim	Bahasa Arab, bahasa jawi dan jawi aceh
9.	Kitab Tasauf Hidayatus Salikin	Bahasa Arab, bahasa jawi dan jawi aceh
10.	Kitab Tasauf Sigharus Salikin	Bahasa Arab, bahasa jawi dan jawi aceh

Kesepuluh OPK Manuskrip Kabupaten Pidie di atas tersimpan di Museum Indatu Desa Balee Pineung Kecamatan Peukan Baroe Kabupaten Pidie Provinsi Aceh. manuskrip-manuskrip ini tertulis dalam bentuk bahan kertas. Mansukrip-manuskrip ini pula memuat berbagai unsur sejarah, silsilah, ajaran agama dan etika (akhlak), naskah kuno. Gambaran bahan dan bahasa manuskrip tersebut dapat dilihat dalam grafik berikut:



Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Pidie, Oktober 2023



Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Pidie, Oktober 2023

Diagram di atas menggambarkan bahwa beberapa manuskrip yang ada terdapat 100 % manuskrip bertulisan Arab dan menggunakan Bahasa Arab, Melayu Jawo dan Bahasa Aceh

IV.2. Tradisi Lisan

Tradisi lisan merupakan salah satu jenis warisan kebudayaan masyarakat setempat yang proses pewarisannya dilakukan secara lisan. Tradisi lisan ini terdiri atas cerita rakyat, bahasa rakyat, teka-teki rakyat (pertanyaan tradisional), peribahasa rakyat (ungkapan tradisional), dan nyanyian rakyat. Tradisi- tradisi lisan merupakan bagian kekuatan kultural suatu suku bangsa. Tradisi lisan sangat beraneka ragam bentuknya, tidak hanya berupa dongeng, mitos, dan legenda atau pantun , hikayat dan syair. Setiap daerah bahkan setiap suku memiliki tradisi lisan masing- masing, termasuk suku Aceh yang mendiami daerah Kabupaten Pidie.

Menurut data dan keterangan yang diperoleh di masyarakat ketika survei dan forum terbuka bahwa orang-orang muda yang dapat menghafal tradisi lisan semakin jarang dan tradisi ini terancam punah kalau tidak segera dilakukan usaha pelestarian.

Tradisi lisan yang terdata pada umumnya dituturkan adalah hiem karena bersifat teka- teki dalam bahasa aceh maka sering kita jumpai baik pertunjukan secara langsung maupun melalui media seperti radio.

Oleh karena itu, upaya yang penting dalam melestarikan tradisi lisan sebagai sumber ilmu pengetahuan pada masa sekarang dan akan datang adalah sangat urgen untuk sosialisasi dan merevitalisasi tradisi lisan. Di samping itu, dalam kaitannya dengan hal ini penting juga memperhatikan upaya pengembangan potensi, penyusunan langkah-langkah perlindungan

termasuk perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dan pemanfaatan tradisi lisan sebagai kekuatan kultural yang kreatif.

IV.3. Adat Istiadat

Diantara banyaknya ragam adat istiadat daerah, Berdasarkan hasil survei dan pengumpulan data terkait adat istiadat masyarakat Kabupaten Pidie, kami mendapatkan 7 jenis objek berkaitan dengan adat istiadat. Di antara nama atau istilah adat istiadat tersebut yaitu: Adat Diet (Diyat), Adat Pantang, Adat Peusijuek, Budaya Boh Gaca, Khanduri Jeurat, Peuayon Aneuk dan Peudamee Ureung

Adat istiadat tersebut, berkaitan dengan beberapa jenis yaitu; adat istiadat tentang tata perilaku masyarakat, adat istiadat terkait perilaku terhadap agama, perkawinan, gotong-royong, dan sebagainya. Namun sangat disayangkan karena beberapa adat istiadat tersebut sudah mulai jarang dilaksanakan oleh masyarakat

IV.4. Ritus

Di dalam suatu kelompok masyarakat tentu ada suatu bentuk ritual. Suatu bentuk ritual bukanlah sesuatu yang mandiri, melainkan terkait dengan aspek- aspek lain. Ritual tersebut sebenarnya terkait dengan suatu sistem kepercayaan dan/atau sistem religi.

Ritus sebagai salah satu objek kebudayaan berupa tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu oleh kelompok masyarakat, seperti halnya masyarakat Kabupaten Pidie. Sesungguhnya, masyarakat Kabupaten Pidie memiliki berbagai banyak perayaan yang diwujudkan dalam bentuk upacara atau ritual.

Berbagai jenis upacara atau ritual dan pesta rakyat berhasil diidentifikasi dalam borang dan hasil survei di masyarakat di sini terdapat 2 jenis. Angka ini nantinya akan terus bertambah seiring proses pengidentifikasian mengingat khasanah ritual masyarakat Kabupaten Pidie sangat kaya yang belum tergali dan teridentifikasi yang selama ini dilakukan oleh masyarakat yang mendiami Kabupaten Pidie.

Dari sejumlah ritus yang ada berdasarkan hasil survei sudah mulai jarang dilaksanakan dalam konteks masyarakat global dewasa ini.

IV.5. Pengetahuan Tradisional

Pengetahuan tradisional dapat dipahami sebagai satu bentuk respon kreatif dari suatu

suku bangsa dalam menjaga keberlangsungan kehidupannya, sehingga tidak satupun suku bangsa yang tidak memiliki pengetahuan tradisional yang berfungsi untuk melakukan penetrasi terhadap kondisi kehidupan sosial dan kondisi lingkungan alam (environment) di mana mereka berada. Kabupaten Pidie dengan jumlah penganut islam hampir 100% mempunyai pengetahuan tradisonal dalam hal pembuatan perhiasan pria yang biasanya dipakai untuk beribadah yaitu kupiah, kupiah riman dan kupiah meukeutop atau kupiah syam jarang didapat di daerah lain

No.	Jenis Penget. Tradisional	Jumlah	Contoh Jenis OPK
1.	Busana Tradisional	2 jenis	Kupiah Riman, Kupiah Meukeutop

IV.6. Teknologi Tradisional

Sejumlah catatan sejarah dan hasil wawancara yang dilakukan menjelaskan bahwa dalam sejarahnya Kabupaten Pidie dihuni oleh penduduk yang bermata pencaharian bidang pertanian tercatat Pidie adalah lumbung padi di Provinsi Aceh. Masyarakat yang mendiami daerah Kabupaten Pidie sangat akrab dan menggantungkan kehidupannya dengan keadaan alam sekitarnya, yakni lingkungan agraris dan kelautan.

Jejak arkeologis sebagai masyarakat agraris dan nelayan sangat mudah ditemukan melalui keberadaan sejumlah teknologi, baik yang bersifat tradisional ataupun modern. Khususnya teknologi tradisional bidang pertanian , tim berhasil mengumpulkan beberapa jenis teknologi tradisional

No.	Jenis Tekno. Tradisional	Jumlah	Jenis OPK
1.	Teknologi Pertanian	3 jenis	Jeungki, Krong, Yok Creuh

sampai saat ini masih sangat akrab dan relevan digunakan oleh masyarakat baik sebagai petani. Berbagai teknologi tradisional yang menjadi objek pemajuan kebudayaan yang tercantum pada tabel sebagian besar digunakan dan diproduksi oleh masyarakat pidie. Namun demikian, sejumlah teknologi tradisional yang digunakan tersebut tidak sepenuhnya menjadi milik otentik dari masyarakat pidie melainkan sebagian melalui proses kontak-kontak budaya.

IV.7. Seni

Banyak sekali warisan seni yang wajib dilestarikan sehingga anak cucu kita. Banyaknya seni di Pidie, tentu menjadi bagian dari kebudayaan nasional Indonesia. Di Kabupaten Pidie, Seni tradisional sering ditampilkan saat ada upacara, pesta, dan ritual adat. Dan beberapa jenis kesenian daerah ini sudah dikembangkan dalam bentuk yang lebih

populer bagi generasi muda saat ini. Secara umum, dari data isian borang OPK dan hasil pendalaman melalui survei, terhimpun ada 6 jenis OPK seni tradisional khas dari berbagai jenis di Kabupaten Pidie.

No.	OPK Seni	Jumlah	Contoh Jenis OPK Seni
1.	Seni Tari	4 jenis	Tari Laweut Aceh, Tari Seudati, Tari Meugrop, Rapai Grimpheng
2.	Seni Teater	1 jenis	Cerita Bakeutok
3.	Seni Musik	1 jenis	Kra

Sumber: Borang dan APIK PPKD Seni Kabupaten Pidie Tahun 2023

IV.8. Bahasa

Bahasa adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan tanda, misalnya kata dan gerakan. Kajian ilmiah bahasa disebut ilmu linguistik. Perkiraan jumlah bahasa di dunia beragam antara 6.000 - 7.000 bahasa. Namun, perkiraan tepatnya bergantung pada suatu perubahan sembarang yang mungkin terjadi antara bahasa dan dialek. Bahasa alami adalah bicara atau bahasa isyarat, tetapi setiap bahasa dapat disandikan ke dalam media kedua menggunakan stimulus audio, visual, atau taktil, sebagai contohnya, tulisan grafis, braille, atau siulan. Hal ini karena bahasa manusia bersifat independen terhadap modalitas. Sebagai konsep umum, "bahasa" bisa mengacu pada kemampuan kognitif untuk dapat mempelajari dan menggunakan sistem komunikasi yang kompleks, atau untuk menjelaskan sekumpulan aturan yang membentuk sistem tersebut atau sekumpulan pengucapan yang dapat dihasilkan dari aturan-aturan tersebut. Semua bahasa bergantung pada proses emiosis untuk menghubungkan isyarat dengan makna tertentu.

Bahasa Aceh adalah sebuah bahasa yang dituturkan oleh suku Aceh yang terdapat di wilayah pesisir, sebagian pedalaman dan sebagian kepulauan di Aceh. Bahasa Aceh termasuk dalam rumpun bahasa Chamic, cabang dari rumpun bahasa Melayu-Polinesia, cabang dari rumpun bahasa Austronesia.

IV.9. Permainan Rakyat

Indonesia yang kaya akan beragam kebudayaan dan alamnya tentu menyimpan keunikan tersendiri dibanding dengan negara lain. Salah satunya ialah tentang macam-macam permainan tradisional yang pernah ada. Ada sejumlah permainan rakyat berhasil terhimpun

dan terinput dalam APIK, sebagai mana tertera dalam tabel berikut:

No.	Nama Jenis Permainan	Suku	Pelaksanaan	Ket.
1.	Catoe Aceh	Aceh	Sering	
2.	Gasing Aceh (Gaseng)	Aceh	Jarang	
3.	Geulayang Tunang	Aceh	Sering	

Terdapat beberapa jenis permainan rakyat tradisional yang berhasil dihimpun dan telah terinput dalam APIK. Paling tidak ada sekitar 3 jenis permainan rakyat yang telah terangkum dalam instrumen borang penyusunan PPKD. Jumlah tersebut masih bersifat relatif, mengingat tidak menutup kemungkinan akan terus bertambah seiring proses pengembangan PPKD yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pidie melalui fasilitasi program pengembangan dan tindak lanjut oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Cq. Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud. RI.

IV.10. Olahraga Tradisional

Seperti halnya permainan rakyat tradisional, penduduk Kabupaten Pidie juga sejak dahulu memiliki kekayaan khazanah budaya jenis olahraga tradisional. Adapun OPK jenis olahraga tradisional masyarakat Kabupaten Pidie yang berhasil terhimpun dalam data borang dandi dalam APIK 2023, berjumlah 1 jenis, seperti yang terlihat dalam tabel berikut:

No.	Nama Jenis Olahraga	Suku	Pelaksanaan	Ket.
1.	Olahraga Geudeu- geudeu	Aceh	Jarang	

Dari tabel di atas, terdapat beberapa jenis olahraga tradisional yang berhasil dihimpun dan telah terinput dalam APIK. Jumlah tersebut masih bersifat relatif, mengingat tidak menutup kemungkinan akan terus bertambah seiring proses pengembangan PPKD yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pidie melalui fasilitasi program pengembangan dan tindak lanjut oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Cq. Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud. RI.

IV.11. Cagar Budaya

Adapun OPK cagar budaya Kabupaten Pidie, dalam konteks ini oleh tim baru berhasil mendata 14 jenis objek. Sesungguhnya terdapat sejumlah cagar budaya di Kabupaten Pidie. Oleh karena itu, proses pendataan terus akan ditindaklanjuti dan akan diupdating secara berkesinambungan dalam sistem APIK OPK.

BAB V

DATA SUMBER DAYA MANUSIA KEBUDAYAAN DAN LEMBAGA KEBUDAYAAN

Salah satu pilar pemajuan kebudayaan adalah ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) kebudayaan dan lembaga kebudayaan. Eksistensi dari setiap OPK sebagai kekayaan bangsa Indonesia akan tetap lestari, terjaga, dan berkembang manakala dimensi SDM dan lembaga kebudayaan di setiap daerah cukup tersedia, baik dari aspek pembuat, pelaku, pemelihara, maupun pengguna budaya itu sendiri.

Trend semakin lunturnya nilai budaya dan kurang terapresiasi ekspresi budaya bangsa, seperti halnya di Kabupaten Pidie, diakibatkan karena semakin berkurang dan lemahnya SDM dan lembaga budaya yang ada di setiap daerah. Gambaran SDM dan lembaga kebudayaan setiap OPK di Kabupaten Pidie dideskripsikan secara singkat sebagai berikut:

V.1. Manuskrip

Berdasarkan hasil survei dan pendalaman melalui studi dokumen, interview, dan FGD terkait OPK manuskrip di Kabupaten Pidie, secara kelembagaan masih cukup tersedia, namun terindikasi lemah dalam aspek SDM. Kelemahan SDM dalam konteks OPK Manuskrip yang ada di Kabupaten Pidie terutama pada aspek SDM pembaca dan penerjemah ahli terhadap beberapa naskah-naskah konu yang ada. Demikian pula dari jumlah pengakses dan lembaga manuskrip.

Adapun jumlah lembaga objek Manuskrip yang ada dalam data borang dan APIK terdapat beberapa lembaga, diantaranya; Dinas Arsip, Perpustakaan, dan Museum dari 10 jenis objek kebudayaan yang ada di Kabupaten Pidie.

V.2. Tradisi Lisan

Secara faktual, orang-orang muda yang dapat menghafal tradisi lisan semakin jarang dan tradisi ini terancam punah kalau tidak segera dilakukan usaha perekaman. Namun demikian, usaha seperti ini jelas bukanlah sekadar ikhtiar melestarikan suatu warisan yang segera hilang, melainkan memberikan berbagai dimensi baru dalam pengertian dan apresiasi tentang apa yang dikenal sebagai kebudayaan tradisional. Bersamaan dengan itu, sudah tentu para penuturnya pun semakin berkurang atau langka. Kondisi ini pun terlihat terhadap ketersediaan SDM dan lembaga OPK Tradisi Lisan di Kabupaten Pidie.

V.3. Adat Istiadat

Berkaitan dengan SDM dan lembaga beberapa objek jenis adat istiadat seperti; adat istiadat tentang tata perilaku masyarakat, adat adat istiadat terkait perilaku terhadap agama, perkawinan, gotong-royong, dan sebagainya terdapat beberapa adat istiadat tersebut sudah mulai jarang dilaksanakan oleh masyarakat Kabupaten Pidie sebagai pemilik murni adat istiadat tersebut. Hal ini tidak terlepas oleh semakin lemahnya SDM dan lembaga objek tersebut.

Kelemahan SDM dalam konteks OPK adat istiadat yang ada di Kabupaten Pidie terutama pada aspek penguatan pelaku adat. Namun demikian, dengan aktifnya penguatan lembaga dan dewan adat Kabupaten Pidie saat ini sangat prospektif dalam pengembangan SDM adat. Demikian pula, dari aspek kelembagaan.

V.4. Ritus

Ritus sebagai salah satu objek kebudayaan berupa tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu oleh kelompok masyarakat, seperti halnya masyarakat lembah Pidie. Sesungguhnya, masyarakat Pidie memiliki berbagai banyak perayaan yang diwujudkan dalam bentuk upacara atau ritual, dan masyarakat Kabupaten Pidie masih banyak melakukan, sehingga dari aspek SDM ritual sesungguhnya masih cukup tersedia.

Dari banyak jenis upacara atau ritual dan pesta rakyat berhasil diidentifikasi dalam borang dan hasil survei di masyarakat terdapat sekitar 20 lembaga. Artinya, secara kelembagaan objek ritus ini masih cukup baik. Demikian pula, dari aspek SDM objek ritus, meskipun masih terdapat pelaku namun ada indikasi semakin berkurang oleh karena trend generasi muda millennial kurang perhatian dalam mempertahankan ritual-ritual leluhurnya.

V.5. Pengetahuan Tradisional

Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian di atas bahwa pengetahuan tradisional di tanah Pidie eksistensinya masih tetap terjaga disebabkan karena pengetahuan tersebut masih relevan dari segi fungsi. Jarangnya dilakukan disebabkan karena bahan baku yang sudah mulai berkurang, tidak relevan untuk beberapa masyarakat, orang yang mengetahui sudah semakin berkurang dan terjadinya perubahan kondisi lingkungan serta sudah mulai tergerus oleh perubahan zaman, sehingga keberadaannya masih tetap terjaga.

Demikian pula pada aspek pengetahuan tradisional lainnya, seperti busana tradisional baju adat dan baju upacara perkawinan, upacara adat, saat ini masih sangat eksis. Hal ini tidak terlepas tingginya komitmen pemerintah dan elemen masyarakat Pidie dalam menggiatkan tema pembangunan berbasis budaya dan adat, baik dalam dimensi ekspresi budaya maupun revitalisasi dan penguatan nilai-nilai budaya dan adat yang di landasi iman dan taqwa (religiusitas).

V.6. Teknologi Tradisional

Pelaku pemanfaatan teknologi tradisional oleh masyarakat Pidie dan juga masyarakat pendatang relatif masih tinggi persentasenya, hal ini disebabkan karena dewasa ini beberapa teknologi tradisional masih relevan secara fungsional dalam mendukung daya survive masyarakat, khususnya untuk sektor pertanian dan nelayan. Namun demikian tetap saja teknologi tradisional sulit menghindari terjadinya perubahan.

Capaian volume produksi. Untuk teknologi yang masih bertahan seperti alat membajak seperti Creuh, selain ramah lingkungan juga dapat digunakan sebagai alternatif ketika teknologi modern mengalami masalah atau biaya operasionalnya cukup tinggi.

V.7. Seni

Dari keseluruhan OPK yang terdata, terekam 6 objek seni dalam borang dan APIK tahun 2023. Objek seni dalam konteks SDM dan kelembagaan di Kabupaten Pidie dalam beberapa tahun terakhir ini cukup baik,

V.8. Bahasa

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa berdasarkan data borang dan APIK, paling tidak ditemukan 3 jenis dialek Bahasa Aceh dipergunakan oleh masyarakat asli Kabupaten Pidie, yaitu: Bahasa Aceh Pesisir; Bahasa Aceh Perkotaan; Bahasa Aceh Pedesaan;

Konteks SDM pengguna Bahasa Aceh dari tiga dialeg tersebut masih tetap eksis dan digunakan dalam bahasa komunikasi di lingkungan masyarakat di Kabupaten Pidie.

V.9. Permainan Rakyat

Berdasarkan persentase diagram, digambarkan jenis permainan yang masih sering dimainkan oleh anak-anak atau masyarakat Kabupaten Pidie. Data ini menunjukkan kalau dari SDM objek permainan rakyat pada prinsipnya cukup tersedia, namun sudah mulai terjadi pergeseran, di mana sudah ada kecenderungan beberapa jenis permainan sudah mengalami kepunahan.

V.10. Olahraga Tradisional

Olahraga Tradisional hingga saat ini masih dipertahankan berdasarkan data borang dan APIK 2023,

V.11. Cagar Budaya

Eksistensi SDM dan lembaga cagar budaya yang ada di Kabupaten Pidie sesungguhnya masih sangat terbatas dan sangat urgen penguatan SDM dan kelembagaan dalam rangka memelihara dan melestarikan cagar budaya yang ada sebagai khazanah kekayaan daerah Kabupaten Pidie.

BAB VI

DATA SARANA DAN PRASARANA KEBUDAYAAN

Sebagai daerah yang mengusung tema pembangunan berbasis budaya dan adat berlandaskan iman dan takwa, pemerintah Kabupaten Pidie saat ini terus berusaha maksimal dan berbuat melakukan pelestarian budaya yang ada di daerah ini. Pelestarian budaya dengan menjaga eksistensi sumber daya manusia (SDM), lembaga, dan sarana dan prasarana budaya dan kearifan lokal suatu daerah sangat urgen menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan hasil survei dan pendataan terkait sarana dan prasarana kebudayaan di Kabupaten Pidie, memang harus diakui masih sangat terbatas, baik sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah maupun sarana dan prasarana yang disiapkan oleh masyarakat. Sarana dan prasarana yang tersedia masih perlu terus ditingkatkan dalam rangka mengakselerasi percepatan pemajuan kebudayaan daerah dan nasional. Dilakukan pengadaan ruang dan tempat untuk melakukan pameran, promosi, dan pertunjukkan seluruh objek kebudayaan pada setiap Even Pedir Raya Festival.

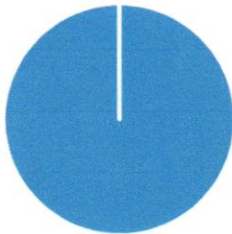
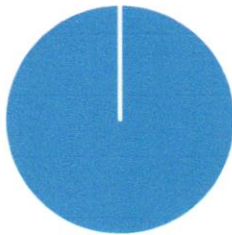
Adapun gambaran umum sapras OPK yang ada di Kabupaten Pidie saat ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

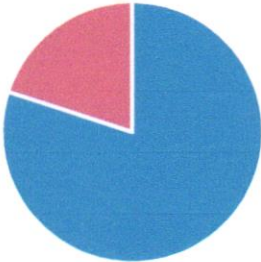
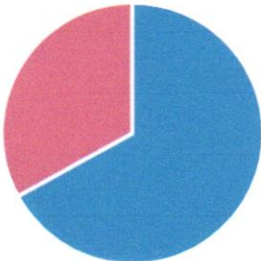
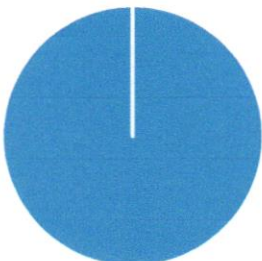
Data Ketersediaan Sapras OPK Kabupaten Pidie

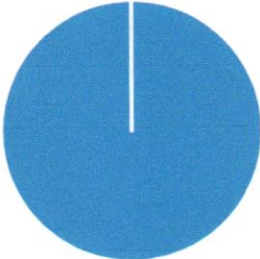
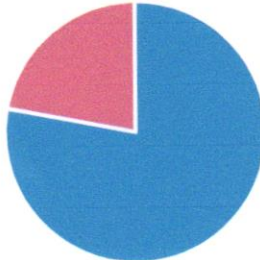
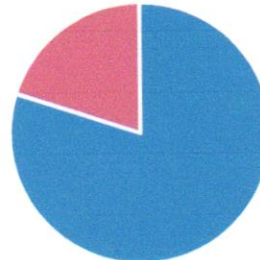
No.	Nama OPK	Sarana Prasarana	
		Pemerintah	Masyarakat
1.	Manuskrip	Belum Ada data pasti	Terbatas
2.	Tradisi Lisan	Belum ada	Ruang Masyarakat
3.	Adat Istiadat	Belum Ada	Ruang Masyarakat.
4.	Ritus	Belum ada data pasti	Ruang Masyarakat
5.	Penget. Tradisional	Belum ada data pasti	Warung Kuliner; pusat produksi;
6.	Teknol. Tradisional	Belum ada data pasti	Terbatas
7.	Seni	Belum ada;	Instrumen seni; komunitas seni

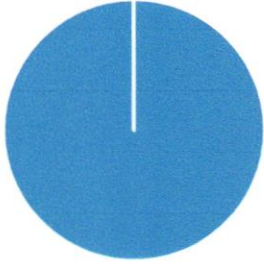
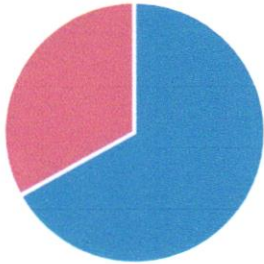
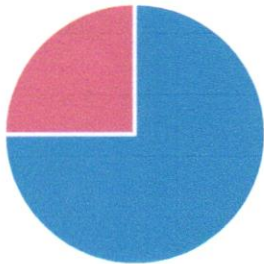
8.	Bahasa	Buku Tata Bahasa Aceh	Buku pedoman adat; dewan adat
9.	Permainan Rakyat	Belum ada data pasti	Belum ada data pasti
10.	Olahraga Tradisi	Belum ada data pasti	Belum ada data pasti
11.	Cagar Budaya	Belum ada data pasti	Belum ada data pasti

Adapun gambaran persentase sarana dan prasarana setiap OPK yang terekam dalam sistem aplikasi APIK dapat dilihat pada beberapa diagram berikut:

Diagram Objek Kebudayaan	Keterangan
OPK Manuskrip  ■ Sarpras Masyarakat ■ Sarpras Pemerintah Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Pidie 2023	Sarpras Pemerintah: 0% Sarpras Masyarakat: 100% Catatan: Masih rendah dan perlu didorong dan diberikan penguatan dan peningkatan.
OPK Tradisi Lisan  ■ Sarpras Masyarakat ■ Sarpras Pemerintah Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Pidie 2023	Sarpras Pemerintah: 0% Sarpras Masyarakat: 100% Catatan: Masih rendah dan perlu didorong dan diberikan penguatan dan perhatian pemerintah.

OPK Adat Istiadat  ■ Sapras Masyarakat ■ Sapras Pemerintah Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Pidie 2023	Sapras Pemerintah: 20% Sapras Masyarakat: 80% Catatan: Masih rendah dan perlu didorong dan saat ini pemerintah sementara melakukan penguatan kelembagaan adat.
OPK Ritus  ■ Sapras Masyarakat ■ Sapras Pemerintah Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Pidie 2023	Sapras Pemerintah: 33% Sapras Masyarakat: 67% Catatan: Masih rendah dan perlu didorong dan diberikan penguatan dan peningkatan.
OPK Pengetahuan Tradisional  ■ Sapras Masyarakat ■ Sapras Pemerintah Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Pidie, 2023	Sapras Pemerintah: 0% Sapras Masyarakat: 100% Catatan: Masih rendah dan perlu didorong dan diberikan penguatan dan peningkatan.

OPK Teknologi Tradisional  ■ Sapras Masyarakat ■ Sapras Pemerintah Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Pidie, Juni 2023	Sapras Pemerintah: 0% SaprasMasyarakat: 100% Catatan: Masih rendah dan perlu didorong dan diberikan penguatan dan peningkatan.
OPK Seni  ■ Sapras Masyarakat ■ Sapras Pemerintah Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Pidie, Juni 2023	Sapras Pemerintah: 22% SaprasMasyarakat: 78 % Catatan: Masih rendah dan perlu didorong dan diberikan penguatan dan peningkatan.
OPK Bahasa  ■ Sapras Masyarakat ■ Sapras Pemerintah Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Pidie, Juni 2023	Sapras Pemerintah: 20% SaprasMasyarakat: 80% Catatan: Masih rendah dan perlu didorong dan diberikan penguatan dan peningkatan.

OPK Permainan Rakyat:  ■ Sapras Masyarakat ■ Sapras Pemerintah Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Pidie, Juni 2023	Sapras Pemerintah: 0% Sapras Masyarakat: 100% Catatan: Masih rendah dan perlu didorong dan diberikan penguatan dan peningkatan.
OPK Olahraga Tradisional:  ■ Sapras Masyarakat ■ Sapras Pemerintah Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Pidie, Juni 2023	Sapras Pemerintah: 33% Sapras Masyarakat: 67% Catatan: Masih rendah dan perlu didorong dan diberikan penguatan dan peningkatan.
OPK Cagar Budaya:  ■ Sapras Masyarakat ■ Sapras Pemerintah Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Pidie, Juni 2023	Sapras Pemerintah: 25% Sapras Masyarakat: 75% Catatan: Masih rendah dan perlu didorong dan diberikan penguatan dan peningkatan.

Keseluruhan Diagram OPK di atas, menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dan juga masyarakat sudah mulai berkontribusi mengambil peran dalam menjaga eksistensi seluruh objek kebudayaan.

Sarana prasarana setiap objek kebudayaan yang ada, baik di masyarakat ataupun yang diadakan oleh pemerintah perlu mendapatkan dukungan kebijakan pemeliharaan dari lembaga formal pemerintah, baik pada level eksekutif dan legislatif. Kebijakan ini selain menghindari terjadinya kepunahan terhadap kekayaan budaya daerah, juga menegaskan otentik kepemilikan dari suatu kebudayaan yang dimiliki oleh Kabupaten Pidie.

Sarana dan prasarana yang tersedia untuk menjaga dan mengembangkan kebudayaan di atas, sebagian besar memang masih berasal dari swadaya masyarakat, sejauh ini pemerintah daerah masih memiliki keterbatasan menyediakan sarana dan prasarana karena terkendala oleh kebijakan dan program yang selama ini lebih mengedepankan pembangunan aspek lainnyadaripada aspek kebudayaan.

Kondisi terbatasnya sarana dan prasarana yang bersumber dari pemerintah pada diagram- diagram di atas tergambar sangat kecil. Hal ini mengindikasikan belum maksimalnya perhatian pemerintah terhadap aspek pemajuan dan pemeliharaan objek kebudayaan daerah Kabupaten Pidie. Garfik di atas menunjukkan bahwa sapras pendukung OPK ini pada umumnya difasilitasi oleh masyarakat dengan kisaran persentase rata-rata hampir berimbang antara pemerintah dan masyarakat. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa kurang maksimalnya perhatian terhadap pemeliharaan dan pemajuan teknologi tradisional dikarenakan terbatasnya pendanaan yang dapat diperuntukkan untuk penyediaan sarana dan prasarana.

BAB VII PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI

VII.1. Permasalahan dan Rekomendasi

VII.1.1. Manuskrip

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2024	2029	2034	2039
1.	Isi dan substansi naskah masih banyak yang belum diketahui secara komprehensif	Penerjemahan naskah kuno	Menggali lebih dalam makna yang terdapat di dalam manuskrip	Naskah manuskrip yang tersimpan di museum	Mendatangkan Tim ahli penerjemah naskah Penerjemahan dan penyusunan naskah	Naskah sudah diterjemahkan dan disusun	Penggalian nilai-nilai historisitas	Penggalian nilai-nilai historisitas	Penggalian nilai-nilai historisitas
2.	Banyak naskah yang sudah tua dan usang dimakan usia	Digitalisasi naskah	Menjaga kelestarian naskah	Naskah mansukip yang tersimpan di museum	Pengadaan alat digital Proses digitalisasi naskah	Naskah sudah digitalisasi	Naskah sudah digitalisasi	Naskah sudah digitalisasi	Naskah sudah digitalisasi

VII.1.2. Tradisi Lisan

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2024	2029	2034	2039
1.	Penutur tradisi sudah usia lanjut dan tidak ada upaya regenerasi	Upaya regenerasi dalam rangka melestarikan tradisi lisan	Melestarikan tradisi lisan	Masyarakat, Lembaga Pendidikan, Generasi muda dan Komunitas Kebudayaan	Melatih penutur tradisi lisan dari kalangan pemuda dan pelajar	Tersedia SDM penutur tradisi lisan	Geliat tradisi lisan semakin berkembang	Desiminasi tradisi lisan secara fill in, kreatif dan inovatif	Desiminasi tradisi lisan secara fill in, kreatif dan inovatif
2.	Kurang referensi, tenaga edukasi, dan tenaga peneliti di bidang tradisi lisan	Penelitian, penulisan, pendidikan dan pengembangan objek tradisi lisan	Pendokumentasi an dan pengadaan buku dan tenaga edukasi (SDM) objek tradisi lisan.	Peneliti, akademisi, budayawan, lembaga pendidikan, dan komunitas seni budaya.	Penelitian budaya tradisi lisan; Penulisan dan pendokumentasian jenis objek tradisi lisan.	Terdokumentas jenis tradisi lisan berbasis riset	Riset pengembang an nilai-nilai tradisi lisan	Terbangun laboratoriu m dan pustaka tradisi lisan	Terbangun laboratorium dan pustaka tradisi lisan

3.	Pertunjukan tradisi lisan sudah sangat jarang dilakukan, baik di level formal maupun informal.	Pertunjukan budaya tradisi lisan di setiap even budaya	Sosialisasi dan melestarikan budaya tradisi lisan	Pemerintah, lembaga adat, lembaga seni budaya, dan pendidikan	Mempersiapkan sapras pertunjukan; Pertunjukan tradisi di setiap event secara terorganisir dan berkesinambungan	Terbangun sapras pertunjukan dan membudaya pertunjukan tradisi lisan.	Tradisi lisan semakin eksis dan aktual di masyarakat	Tradisi lisan Internasional	Tradisi lisan go Internasional
----	--	--	---	---	---	---	--	-----------------------------	--------------------------------

VII.1.3. Adat Istiadat

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2024	2029	2034	2039
1.	Sistem nilai budaya atau adat istiadat lokal yang selama ini mengatur tata kelakuan hidup manusia telah kehilangan legitimasinya sehingga posisi adat-istiadat telah diganti oleh hukum positif.	Revitalisasi dan reaktualisasi adat istiadat dan hukum adat dalam masyarakat.	Mempertahankan nilai budaya adat istiadat lokal sebagai sistem nilai dalam tata kehidupan.	Lembaga atau Dewan adat	Identifikasi ragam adat istiadat Sosialisasi dan Penetapan perda tentang adat; Pelaksanaan hukum adat Pelaksanaan adat dan hukum adat	Teridentifikasi ragam adat istiadat Ada produk hukum ttg adat istiadat	Adat istiadat terus terjaga dan dilaksanakan serta menjadi kota beradat	Adat istiadat terus terjaga dan dilaksanakan serta menjadi kota beradat	Adat istiadat terus terjaga dan dilaksanakan serta menjadi kota beradat

2.	Nilai-nilai kepercayaan yang bersumber dari tradisi dan agama mulai luntur dan posisinya telah diganti oleh nilai-nilai ilmu pengetahuan yang sekuler	Revitalisasi nilai-nilai dan kearifan lokal dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan nilai religi.	Internalisasi nilai-nilai kearifan lokal dalam membangun karakter.	Lembaga keluarga Lembaga pendidikan	Menyusun buku tentang adat istiadat Mengembangkan program pendidikan terintegrasi nilai-nilai adat istiadat dan budaya lokal	Ada Buku tentang adat istiadat dan kearifan lokal Ada Buku panduan pendidikan berbasis nilai-nilai adat dan kearifan lokal	Tradisi ada hidup dimasyarakat dan menjadi bagian program pendidikan secara terintegrasi	Tradisi ada hidup di masyarakat dan menjadi bagian program pendidikan secara terintegrasi	Tradisi ada hidup dimasyarakat dan menjadi bagian program pendidikan secara terintegrasi
3.	Di dalam masyarakat telah mulai luntur nilai gotong-royong dan diganti dengan nilai individualistis yang mengancam akhlak manusia.	Reaktualisasi pola hidup masyarakat yang bergotong royong	Menciptakan sikap hidup gotong-royong secara beradat	Masyarakat, Keluarga dan generasi muda	Membangun program berbasis hidup gotong-royong Penguatan pendidikan karakter gotong royong di keluarga, sekolah, dan masyarakat.	Suasana hidup masyarakat yang penuh sikap gotong royong	Suasana hidup masyarakat yang penuh sikap gotong royong	Suasana hidup masyarakat yang penuh sikap gotong royong	Suasana hidup masyarakat yang penuh sikap gotong royong

VII.1.4. Ritus

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2024	2029	2034	2039
1.	Pelaku ritus sudah mulai berkurang dan yang konsisten melaksanakan sudah berusia lanjut dan tidak	Reaktualisasi dan regenerasi melalui proses trans-internalisasi pengetahuan ritus yang masih	Memelihara eksistensi ritual-ritual leluhur	Lembaga keluarga, adat, dan masyarakat.	Reaktualisasi dan sosialisasi kepada generasi penerus	Pelaksanaan ritus hidup kembali di tengah masyarakat dan Tersedia sapras pelaksanaan	Pelaksanaan ritus hidup kembali di tengah masyarakat dan Tersedia sapras	Pelaksanaan ritus hidup kembali di tengah masyarakat dan Tersedia	Pelaksanaan ritus hidup kembali di tengah masyarakat dan Tersedia sapras
	ada upaya regenerasi	relevan untuk dikembangkan				riutual.	pelaksanaan riutual.	sapras pelaksanaan riutual.	pelaksanaan riutual.

2.	Nilai-nilai kepercayaan dalam acara ritual sudah memudar seiring perkembangan rasionalitas manusia akibat kemajuan ilmu pengetahuan moder.	Melakukan riset dan penyusunan buku yang mengungkap sisi rasionalitas nilai ritus dalam konteks sosial masyarakat	Mempertemukan sisi rasionalitas ritus dengan nilai kearifan lokal	Pemerintah, tokoh adat, masyarakat, akademisi, dan budayawan serta generasi muda	Melakukan riset dan penyusunan buku; Sosialisasi dan penguatan pemahaman rasional di lembaga pendidikan.	Ada buku hasil riset tentang ritus Penguatan pemahaman nilai-nilai kearifan dalam lembaga pendidikan	Ada buku hasil riset tentang ritus Penguatan pemahaman nilai-nilai kearifan dalam lembaga pendidikan	Ada buku hasil riset tentang ritus Penguatan pemahaman nilai-nilai kearifan dalam lembaga pendidikan	Ada buku hasil riset tentang ritus Penguatan pemahaman nilai-nilai kearifan dalam lembaga pendidikan
3.	Lemahnya penguatan lembaga adat dan masyarakat dalam memelihara dan melestarikan ritual/tradisi ritus.	Penguatan lembaga ada dan masyarakat dalam memelihara dan melestarikan ritus.	Fungsionalisasi lembaga adat dan masyarakat dalam melestarikan budaya lokal (ritus)	Lembaga adat dan masyarakat	Penguatan lembaga adat dan masyarakat dalam melestarikan ritus; Penyediaan sapras yang dibutuhkan dalam pelaksanaan ritus.	Lembaga adat dan masyarakat yang fungsional dalam memelihara ritus; Ada produk hukum tentang ritus Kabupaten Pidie.	Lembaga adat dan masyarakat yang fungsional dalam memelihara ritus; Ada produk hukum tentang ritus Kabupaten Pidie.	Lembaga adat dan masyarakat yang fungsional dalam memelihara ritus; Ada produk hukum tentang ritus kabupaten Pidie.	Lembaga adat dan masyarakat yang fungsional dalam memelihara ritus; Ada produk hukum tentang ritus Kabupaten Pidie.

VII.1.5. Pengetahuan Tradisional

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2024	2029	2034	2039
1.	Ketersediaan bahan baku dalam pembuatan beberapa jenis pengetahuan tradisional semakin sulit.	Perlu dilakukan upaya pelestarian dan pengembangan bahan baku pembuatan pengetahuan tradisional yang masih relevan.	Pelestarian, beberapa bahan baku jenis pengetahuan tradisional masih yang relevan.	Bahan baku makanan tradisional; busana, dan pengobatan.	Pembuatan taman dan lahan pelestarian bahan baku pembuatan makanan tradisional, busana tradisional, dan pengobatan tradisional.	Tersedia taman, lahan dan sebagainya yang memproduksi bahan baku pembuatan beberapa jenis pengetahuan tradisional. Sep. Bahan makan tradisionl	Geliat aktualisasi dan promosi beberapa jenis pengetahuan semakin berkembang dan mentradisi.	Geliat aktualisasi dan promosi beberapa jenis pengetahuan semakin berkembang dan mentradisi.	Geliat aktualisasi dan promosi beberapa jenis pengetahuan semakin berkembang dan mentradisi.
2.	Lemahnya penguatan lembaga adat dan masyarakat untuk melestarikan khazanah pengetahuan tradisional	Penguatan lembaga adat dan masyarakat dalam menjaga dan memelihara pengetahuan tradisional.	Melibatkan lembaga ada dan masyarakat secara luas dalam melestarikan dan mengembangkan pengetahuan tradisional	Lembaga adat dan masyarakat, dan pelaku kuliner dan Pengobatan tradisional	Identifikasi secara optimal sejumlah jenis ilmu pengetahuan tradisional; Penguatan dan pelibatan lembaga adat dalam melestarikan pengetahuan tradisional; Pembangunan pusat pameran dan promosi sejumlah jenis	Tersedia Buku khzanah pengetahuan tradisional. Proaktif lembaga adat dan masyarakat dalam kegiatan pelestarian pengetahuan tradisional. Tersedia ruang dan sapras pameran dan promosi jenis	Produktivitas dan kreasi jenis pengetahuan tradisional semakin berkembang.	Produktivitas dan kreasi jenis pengetahuan tradisional semakin berkembang.	Produktivitas dan kreasi jenis pengetahuan tradisional semakin berkembang.

					pengetahuan tradisional, seperti kuliner tradisional dan busana tradisional.	pengetahuan tradisional.			
3.	Belum ada produk hukum tentang legalitas original jenis pengetahuan tradisional, seperti kuliner, busana adat Kabupaten Pidie	Mendorong legislatif dan eksekutif menetapkan status formal jenis pengetahuan tradisional yang ada di Kabupaten Pidie	Menjaga orisinalitas sejumlah jenis ilmu pengetahuan tradisional yang ada di Kabupaten Pidie	Pemerintah dan anggota legislatif	Melakukan sosialisasi perlunya penetapan hukum formal terhadap jenis ilmu pengetahuan tradisional. Pembuatan produk hukum pengetahuan tradisional.	Ada aturan hukum formal tentang pengetahuan tradisional.			

VII.1.6. Teknologi Tradisional

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2024	2029	2034	2039
1.	Ketersediaan bahan baku dalam pembuatan beberapa jenis teknologi tradisional semakin sulit.	Perlu dilakukan upaya pelestarian dan pengembangan bahan baku pembuatan teknologi tradisional yang masih relevan	Pelestarian, beberapa bahan baku jenis teknologi tradisional yang masih relevan	Bahan baku teknologi tradisional.	Menjaga ketersediaan bahan-bahan jenis pengetahuan tradisional yang masih relevan, seperti; kerajinan, arsitektur, dan perkakas pertanian.	Tersedia bahan dan sapras produktivitas teknologi pertanian	Geliat aktualisasi dan produktivitas teknologi tradisional semakin berkembang.	Geliat aktualisasi dan produktivitas teknologi tradisional semakin berkembang.	Geliat aktualisasi dan produktivitas teknologi tradisional semakin berkembang.
2.	Lemahnya penguatan	Penguatan lembaga adat	Melibatkan lembaga ada	Lembaga adat dan masyarakat,	Identifikasi secara optimal sejumlah	Tersedia Buku khazanah	Produktivitas dan kreasi	Produktivitas dan kreasi	Produktivitas dan kreasi

	lembaga adat dan masyarakat untuk melestarikan khazanah teknologi tradisional	dan masyarakat dalam menjaga dan memelihara teknologi tradisional.	dan masyarakat secara luas dalam melestarikan dan mengembangkan teknologi tradisional	komunitas petani, nelayan, dan arsitek.	jenis teknologi tradisional; Penguatan dan pelibatan lembaga adat dalam melestarikan teknologi tradisional; Pembuatan miniatur rumah-rumah adat berbasis arsitektur yang sekaligus sebagai wadah promosi sejumlah teknologi dan pengetahuan tradisional.	teknologi tradisional. Proaktif lembaga adat dan masyarakat dalam kegiatan pelestarian teknologi tradisional. Tersedia ruang dan sarana pameran dan promosi jenis teknologi tradisional.	jenis teknologi tradisional semakin berkembang.	kreasi jenis teknologi tradisional semakin berkembang.	jenis teknologi tradisional semakin berkembang.
3.	Belum ada produk hukum tentang legalitas original jenis teknologi tradisional, seperti kuliner, Pakaian Adat Kabupaten Pidie	Mendorong legislatif dan eksekutif menetapkan status formal jenis teknologi tradisional yang ada di Kabupaten Pidie	Menjaga orisinalitas sejumlah jenis teknologi tradisional yang ada di Kabupaten Pidie	Pemerintah dan anggota legislatif	Melakukan sosialisasi perlunya penetapan hukum formal terhadap jenis teknologi tradisional. Pembuatan produk hukum pengetahuan tradisional.	Ada aturan hukum formal tentang teknologi tradisional.			

VII.1.7. Seni

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2024	2029	2034	2039
1.	Perlengkapan alat-alat kesenian tradisional dan modern sangat terbatas sehingga terkadang menggunakan peralatan sewa.	Pengadaan alat-alat kesenian tradisional dan modern yang representatif untuk pengembangan kesenian Kabupaten Pidie	Memaksimalkan ekspresi dan produktivitas serta kualitas kesenian Kabupaten Pidie	Sanggar atau dewan kesenian setiap cabang seni daerah	Mengidentifikasi alat-alat kesenian yang dibutuhkan; Pengadaan alat-alat kesenian yang dibutuhkan	Memiliki alat-alat kesenian yang relevan dengan kebutuhan pengembangan seni di setiap cabang seni.	Memiliki alat-alat kesenian yang relevan dengan kebutuhan pengembangan seni di setiap cabang seni.	Memiliki alat-alat kesenian yang relevan dengan kebutuhan pengembangan seni di setiap cabang seni.	Memiliki alat-alat kesenian yang relevan dengan kebutuhan pengembangan seni di setiap cabang seni.
2.	Belum ada gedung pertunjukan pagelaran musik tradisional yang permanen	Pengadaan gedung pertunjukan dan pagelaran musik tradisional yang permanen	Ada pusat pagelaran dan pertunjukan seni Kabupaten Pidie	Sanggar atau dewan kesenian setiap cabang seni daerah	Membangun gedung kesenian	Terbangun gedung kesenian sebagai pusat pertunjukan dan pagelaran seni	Produktivitas pertunjukan dan even kesenian semakin menggeliat.	Produktivitas pertunjukan dan even kesenian semakin menggeliat.	Produktivitas pertunjukan dan even kesenian semakin menggeliat.
3.	Pemahaman dan pengetahuan serta skill generasi muda dalam bidang seni tradisional semakin berkurang	Pendidikan dan pelatihan seni bagi generasi muda Kabupaten Pidie	Membina dan mengembangkan bakat dan potensi seni generasi muda	Generasi muda, pelajar, dan komunitas seni	Mengaktifkan pelaku seni dalam pembinaan dan pelatihan seni; Penguatan pembelajaran musik di sekolah terkait seni lokal; Mendirikan sekolah kesenian.	Pelaku seni budaya semakin meningkat dan berkembang; Kurikulum Mulok di sekolah dan ada sekolah kesenian	Produktivitas seni lokal secara kreatif semakin berkembang	Seni budaya lokal Kabupaten Pidie menggabungkan dan pembangunan Perguruan Tinggi seni	Terbangun Perguruan Tinggi Kesenian

4.	Belum ada gedung pustaka naskah sastra dalam pengembangan seni sastra	Pembangunan perpustakaan dan pusat literasi sastra lokal	Pengembangan pustaka kesusasteraan daerah	Pemkot, dinas arsip dan perpustakaan; lembaga pendidikan; dan pegiat sastra	Mendirikan pojok baca dan perpustakaan sastra Penguatan literasi di bidang sastra daerah	Terdapat pojok baca atau perpustakaan sastra daerah	Geliat literasi sastra daerah maju dan berkembang.	Geliat literasi sastra daerah maju dan berkembang	Geliat literasi sastra daerah maju dan berkembang.
5.	Belum ada fasilitas dan rumah produksi yang representatif dalam memproduksi seni dan film	Membangun rumah produksi seni film lokal dan nasional di Kabupaten Pidie	Mengembangkan kreativitas dan produktivitas pelaku seni film daerah	Pelaku seni film	Membangun rumah produksi; Melatih skill generasi muda di bidang produksi film Produksi film seni dan dokumenter daerah, dan film lainnya.	Rumah produksi film terbangun secara representatif	Kuantitas dan kualitas pelaku seni film semakin baik dan produktif.	Geliat seni film semakin maju dan go nasional dan internasional.	Geliat seni film semakin maju dan go nasional dan internasional.
6.	Lembaga/komunitas seni belum optimal dalam pelestarian dan pengembangan kesenian daerah.	Lembaga/Komunitas seni melakukan pelestarian dan pengembangan kesenian secara optimal	Pelestarian dan pengembangan kesenian daerah	Lembaga/Sanggar seni dan lembaga pendidikan	Pembentukan kelompok binaan cabang seni Pembinaan secara informal dan formal terkait kesenian daerah Penguatan seni di lembaga pendidikan sebagai pelajaran mulok	Khazanah kesenian daerah semakin lestari dan berkembang Pembinaan sanggar seni semakin menggeliat dan dijadikan sebagai kurikulum Mulok di	Khazanah kesenian daerah semakin lestari dan berkembang Pembinaan sanggar seni semakin menggeliat dan dijadikan sebagai kurikulum Mulok di	Khazanah kesenian daerah semakin lestari dan berkembang Pembinaan sanggar seni semakin menggeliat dan dijadikan sebagai kurikulum Mulok di	Khazanah kesenian daerah semakin lestari dan berkembang Pembinaan sanggar seni semakin menggeliat dan dijadikan sebagai kurikulum Mulok di

						lembaga pendidikan.	lembaga pendidikan.	kurikulum Mulok di lembaga pendidikan.	lembaga pendidikan.
--	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------	--	---------------------

VII.1.8. Bahasa

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2024	2029	2034	2039
1.	Penutur bahasa Aceh sebagai bahasa penduduk asli Kabupaten Pidie semakin berkurang.	Peningkatan kualitas dan kuantitas penutur bahasa daerah	Peningkatan kualitas dan kuantitas penutur bahasa daerah	Lembaga/Pusta bahasa; lembaga adat; dan lembaga pendidikan.	Melakukan diklat dan pengembangan bahasa daerah; Menyusun kamus bahasa daerah secara lengkap dari seluruh dialek Aceh di Kabupaten Pidie	Kuantitas dan kualitas penutur bahasa daerah meningkat; dan tersusunnya buku dan kamus bahasa daerah.	Kuantitas dan kualitas penutur bahasa daerah meningkat; dan tersusunnya buku dan kamus bahasa daerah.	Kuantitas dan kualitas penutur bahasa daerah meningkat; dan tersusunnya a buku dan kamus bahasa daerah.	Kuantitas dan kualitas penutur bahasa daerah meningkat; dan tersusunnya buku dan kamus bahasa daerah.
2.	Di dalam keluarga telah mulai jarang menggunakan bahasa Aceh sebagai bahasa ibu akibat trend modernisasi.	Penguatan penggunaan bahasa daerah di dalam lingkugan keluarga.	Pelestarian penggunaan bahasa daerah dalam kehidupan keluarga	Masyarakat Kabupaten Pidie	Sosialisasi pentingnya mempertahankan bahasa ibu (daerah) dalam lingkungan keluarga sebagai upaya pelestarian bahasa daerah.	Bahasa daerah tetap lestari dan digunakan dalam lingkungan Masyarakat Kabupaten Pidie	Bahasa daerah tetap lestari dan digunakan dalam lingkungan Masyarakat Kabupaten Pidie	Bahasa daerah tetap lestari dan digunakan dalam lingkungan Masyarakat Kabupaten Pidie	Bahasa daerah tetap lestari dan digunakan dalam lingkungan Masyarakat Kabupaten Pidie
3.	Adanya rasa malu dalam diri generasi muda	Penggunaan bahasa daerah di dalam lingkugan	Membangun rasa bangga terhadap bahasa	Masyarakat dan geberasi muda	Sosialisasi dan pembudayaan penggunaan	Bahasa daerah tetap lestari dan digunakan	Bahasa daerah tetap lestari dan	Bahasa daerah tetap lestari	Bahasa daerah tetap lestari dan

	untuk menggunakan bahasa daerahnya.	informal dan sosial masyarakat.	daerah sebdiri		bahasa daerah sebagai bahasa komunikasi sehari-hari.	oleh generasi dan masyarakat.	digunakan oleh generasi dan masyarakat.	dan digunakan oleh generasi dan masyarakat.	digunakan oleh generasi dan masyarakat.
--	-------------------------------------	---------------------------------	----------------	--	--	-------------------------------	---	---	---

VII.1.9. Permainan Rakyat

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2024	2029	2034	2039
1.	Pelaku dan pemeran permainan tradisional semakin ditinggalkan oleh generasi muda akibat modernisasi budaya	Reaktualisasi permainan rakyat melalui penguatan moluk di lembaga pendidikan	Untuk melestarikan permainan rakyat	Lembaga pendidikan	Menyusun buku inventarisasi ttg jenis permainan rakyat; Membuat buku panduan pembelajaran Mulok permainan tradisional di lembaga pendidikan.	Buku tentang permainan tradisional tersedia dan dijadikan sebagai kurikulum Mulok di sekolah.	Permainan rakyat semakin lestari dan berkembang.	Permainan rakyat semakin lestari dan berkembang.	Permainan rakyat semakin lestari dan berkembang.
2.	Jarang dilakukan even pertandingan dan pagelaran permainan rakyat	Menggeliatkan even dan festival permainan rakyat	Melestarikan dan menjadikan permainan rakyat.	Komunitas masyarakat dan lembaga pendidikan.	Melakukan sosialisasi dan pembinaan permainan tradisional; Melakukan even dan festival permainan dalam setiap moment yang diikuti oleh	Terlaksana festival permainan rakyat di setiap moment tertentu di Kabupaten Pidie	Terlaksana festival permainan rakyat di setiap moment tertentu di Kabupaten Pidie	Terlaksana festival permainan rakyat di setiap moment tertentu di Kabupaten Pidie	Terlaksana festival permainan rakyat di setiap moment tertentu di Kabupaten Pidie
					seluruh komponen masyarakat dan generasi muda.				

3.	Tidak ada lembaga dan produk hukum yang mengatur dan melestarikan eksistensi permainan rakyat	Menetapkan produk hukum penetapan permainan rakyat sebagai tradisi origin Kabupaten Pidie	Melestarikan dan menjaga hak legalitas permainan rakyat	Pemerintah dan lembaga adat.	Menyusun draft penetapan hukum legalitas permainan rakyat Kabupaten Pidie.	Ada produk hukum permainan rakyat.			
----	---	---	---	------------------------------	--	------------------------------------	--	--	--

VII.1.10. Olahraga Tradisional

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2024	2029	2034	2039
1.	Pelaku dan pemain olahraga tradisional semakin berkurang di masyarakat akibat perkembangan olahraga modern	Reaktualisasi olahraga tradisional melalui penguatan moluk di lembaga pendidikan	Untuk melestarikan olahraga tradisional	Lembaga pendidikan	Menyusun buku inventarisasi tentang jenis olahraga tradisional; Membuat buku panduan pembelajaran Mulok olahraga tradisional di lembaga pendidikan.	Buku tentang olahraga tradisional tersedia dan dijadikan sebagai kurikulum Mulok di sekolah.	Olahraga tradisional semakin lestari dan berkembang.	Olahraga tradisional semakin lestari dan berkembang.	Olahraga tradisional semakin lestari dan berkembang.
2.	Jarang dilakukan even pertandingan olahraga tradisional	Menggeliatkan even dan pertandingan olahraga tradisional	Melestarikan dan menjadikan olahraga tradisional.	Komunitas masyarakat dan lembaga pendidikan.	Melakukan sosialisasi dan pembinaan olahraga tradisional; Melakukan even	Terlaksana pertandingan olahraga tradisional di setiap moment tertentu di Kabupaten Pidie	Terlaksana pertandingan olahraga tradisional di setiap moment	Terlaksana pertandingan olahraga tradisional di setiap moment	Terlaksana pertandingan olahraga tradisional di setiap moment

					dan pertandingan olahraga tradisional dalam setiap moment yang diikuti oleh seluruh komponen masyarakat dan generasi muda.		tertentu di Kabupaten Pidie	tertentu di Kabupaten Pidie	tertentu di Kabupaten Pidie
3.	Tidak ada lembaga dan produk hukum yang mengatur dan melestarikan eksistensi olahraga tradisional.	Menetapkan produk hukum penetapan olahraga tradisional sebagai olahraga original Kabupaten Pidie	Melestarikan dan menjaga hak legalitas permainan tradisional.	Pemerintah dan lembaga adat.	Menyusun draft hukum dan penetapan hukum legalitas olahraga tradisional Kabupaten Pidie	Ada produk hukum terkait olahraga tradisional rakyat.			

VII.1.11. Cagar Budaya

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2024	2029	2034	2039
1.	Pemeliharaan situs cagar budaya belum optimal dilakukan	Peningkatan pemeliharaan cagar budaya	Pelestarian dan pemeliharaan cagar budaya	cagar budaya Kabupaten Pidie	Pendataan secara riil dan pemeliharaan objek cagar budaya Kabupaten Pidie	Terdapat dan tertata secara baik cagar budaya Kabupaten Pidie	Terdapat dan tertata secara baik cagar budaya Kabupaten Pidie	Terdapat dan tertata secara baik cagar budaya Kabupaten Pidie	Terdapat dan tertata secara baik cagar budaya Kabupaten Pidie

VII.2. Upaya

Kebudayaan, baik budaya lokal maupun nasional adalah kebudayaan kita bersama yakni kebudayaan yang mempunyai makna bagi kita bangsa Indonesia. Maka dari itu, wajib untuk menjaga dan melestarikannya. Tanggung jawab untuk melestarikan kebudayaan tersebut, menjadi kewajiban bersama antara seluruh kemonon masyarakat dengan pemerintah.

Masyarakat dan pemerintah harus tegas dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan Indonesia dengan cara revitalisasi, reaktualisasi, rekonstruksi, fill-in, kreasi dan inovasi, serta membuat peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi budaya bangsa.

Beberapa upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan, yaitu; (1) Revitalisasasi (dihidupkan lagi dan didorong agar tumbuh dan berkembang); Reaktualisasi (dihidupkan kembali); Revisi (d disesuaikan dari tujuan semula; Restrukturisasi (dimodifikasi agar sesuai dengan zamannya); Fill In (diisi dengan nilai-nilai baru); Inovasi (adanya kreativitas budayawan agar lebih menarik); Kreasi (membuat kreasi baru yang sesuai dengan daerahnya); dan Delete (adanya penghapusan nilai-nilai yang tidak sesuai).

Dalam konteks upaya pemajuan kebudayaan di Kabupaten Pidie saat ini ditemukan beberapa upaya sebagai berikut:

No.	Upaya yang Dilakukan	Objek Kebudayaan
1.	Upaya revitalisasi dan reaktualisasi seluruh konteks objek kebudayaan melalui pengidentifikasian seluruh OPK di Kabupaten Pidie.	Seluruh Objek kebudayaan
2.	Upaya penguatan lembaga keadatan di Kabupaten Pidie sesuai semangat visi pembangunan Kabupaten Pidie sebagai kabupaten ; Wisata, Berbudaya, dan Beradat di Landasi Iman dan Taqwa.	Adat istiadat, ritus, tradisi lisan, pengetahuan, dan bahasa, dsb.
3.	Penguatan peran kelembagaan adat dan Dewan Kesenian Pidie dalam pemajuan kebudayaan.	Seluruh Objek kebudayaan
4.	Upaya pelestarian dan promosi budaya lokal melalui even Pedir Raya Festival serta even lainnya di setiap tahun di mana dengan melakukan pameran, pertunjukan, pagelaran, dan promosi budya lokal, seperti: kesenian, ritual, adat, permainan, olahraga, dan kuliner lokal.	Seluruh Objek Kebudayaan

.	Penyusunan Kamus bahasa, dan karya seni sastra lokal dengan penguatan literasi kebudayaan di beberapa komunitas seni budaya Kabupaten Pidie.	Seni, Bahasa, dan Sastra.
6.	Penguatan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam pembentukan karakter melalui lembaga pendidikan	Busana, adat-istiadat, tradisi, seni, pengetahuan, teknologi, permainan dan olahraga tradisional
7.	Pelaksanaan program dan kebijakan yang berbasis kebudayaan;	Pengetahuan (Busana tradisional)

VII.3. Permasalahan Umum dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil survei, diskusi terbuka, dan pengkajian terhadap berbagai upaya yang dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun seluruh komponen masyarakat dalam pemajuan kebudayaan di Kabupaten Pidie, ditemukan beberapa permasalahan secara umum, yaitu:

1. Belum teridentifikasi dan terdokumentasi secara komprehensif seluruh khazanah kekayaan budaya lokal Kabupaten Pidie;
2. Sumber daya manusia (penutur, pembuat, pelaku, pemelihara), dan sarana prasarana pelestarian seluruh objek kebudayaan daerah semakin berkurang, punah, dan terdisrupsi oleh kemajuan teknologi dan modernitas;
3. Pelestarian dan revitalisasi beberapa adat dan ritual tradisional daerah mendapat tantangan dari perspektif religiusitas sosial, yang dianggap menghidupkan kembali kepercayaan animisme dan dinamisme;
4. Ketersediaan bahan baku dan alat pembuatan dan pelaksanaan beberapa objek budaya, seperti; kuliner, busana, alat, dan perlengkapan ritual yang bersumber dari alam hayati (nabati dan hewani) semakin langka dan lebih mahal.
5. Kelengkapan pedoman, dokumen, dan kurikulum berbasis nilai-nilai budaya dan kearifan lokal belum ada secara sistematis dan terstruktur dengan optimal, seperti: kurikulum muatan lokal bahasa daerah, kurikulum muatan seni budaya daerah, kurikulum muatan seni budaya daerah olahraga dan kesehatan, desain program pendidikan dan pembelajaran seluruh mata pelajaran terintegrasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

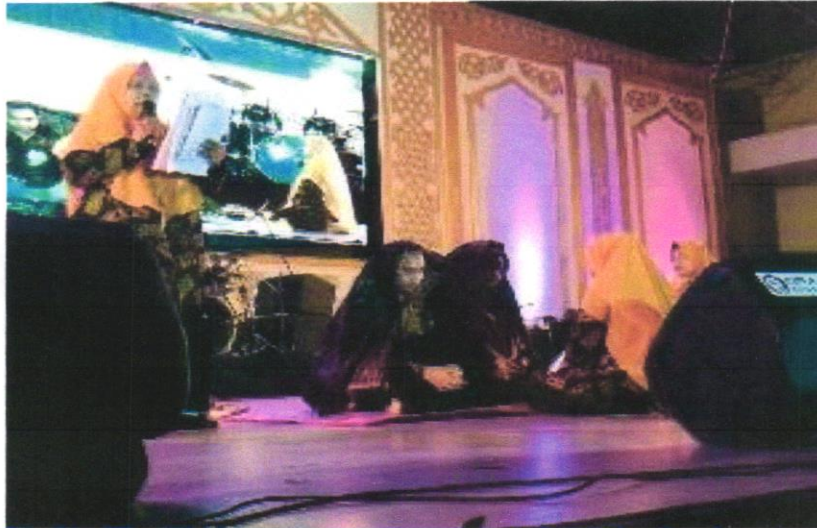
6. Masih banyak jenis objek budaya lokal yang belum memiliki produk hukum yang menetapkan sebagai kekayaan asli (origin) budaya lokal Kabupaten Pidie.

Rekomendasi Umum:

Berdasarkan keenam permasalahan yang ditemukan di atas, maka direkomendasikan sebagai berikut:

- a. Sebagai tindak lanjut penyusunan PPKD ini, maka dipandang perlu membentuk tim identifikasi, dokumentasi, dan validasi secara komprehensif seluruh khazanah kekayaan budaya lokal Kabupaten Pidie yang belum sempat terdata;
- b. Penguatan tenaga SDM setiap OPK melalui pelatihan, pembinaan, dan pengembangan, baik secara formal maupun informal, serta penyediaan sarana prasarana pelestarian seluruh objek kebudayaan daerah;
- c. Dibentuk Tim peneliti dan pengkajian untuk mempertemukan sisi positif dari nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dengan konteks ajaran agama, dan atau dalam kerangka melakukan restrukturisasi secara fill-in budaya lokal dengan nilai ajaran agama;
- d. Menyediakan dan mengembangkan lahan untuk pengembangan bahan baku dan alat pembuatan dan pelaksanaan beberapa objek budaya, seperti; kuliner, busana, alat, dan perlengkapan ritual yang bersumber dari alam hayati (nabati dan hewani);
- e. Menyusun buku pedoman, dokumen, dan kurikulum berbasis nilai-nilai budayawan kearifan lokal belum ada secara sistematis dan terstruktur dengan optimal, seperti: kurikulum muatan lokal bahasa daerah, kurikulum muatan seni budaya daerah, kurikulum muatan seni budaya daerah olahraga dan kesehatan, desain program pendidikan dan pembelajaran seluruh mata pelajaran terintegrasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal;
- f. Mendorong legislatif dan eksekutif menetapkan produk hukum berkaitan dengan pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah dan nasional.
- g. Mendorong kerjasama dengan pihak Perguruan Tinggi, lembaga adat, komunitas seni budaya, dalam pemajuan kebudayaan daerah.

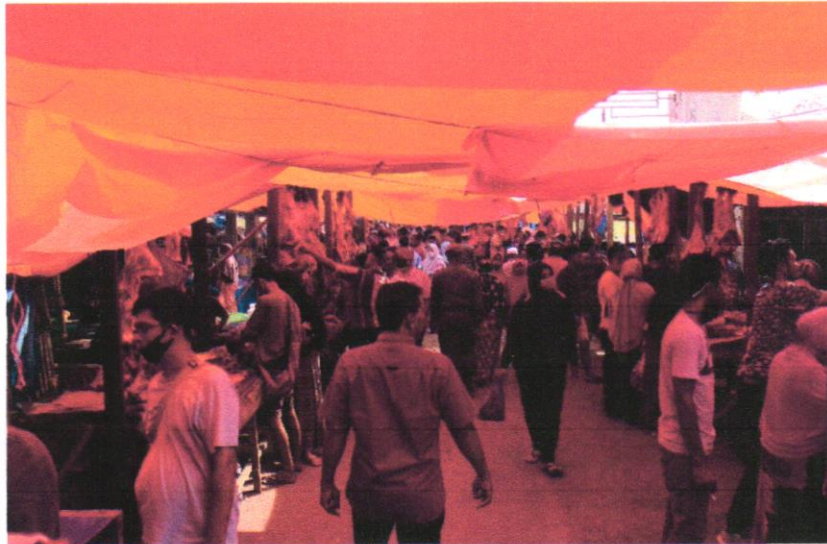
ADAT ISTIADAT KABUPATEN PIDIE



PEUSIJUEK (TEPUNG TAWAR)



INTAT LINTO (MENGANTAR PENGANTIN PRIA)



MEUGANG (TRADISI JUALAN DAGING MENYAMBUT BULAN PUASA DAN HARIRAYA IDUL FITRI)



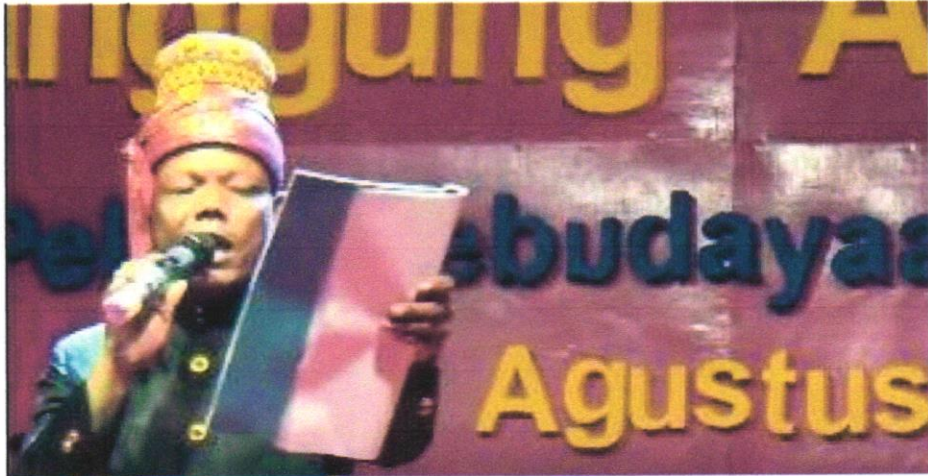
SUSON RANUP (MERANGKAI SIRIH UNTUK ANTARAN PENGANTIN)

BOH GACA (BERINAI) UNTUK PENGANTIN WANITA

ADAT ISTIADAT PIDIE



**BUDAYA LISAN
KABUPATEN PIDIE**

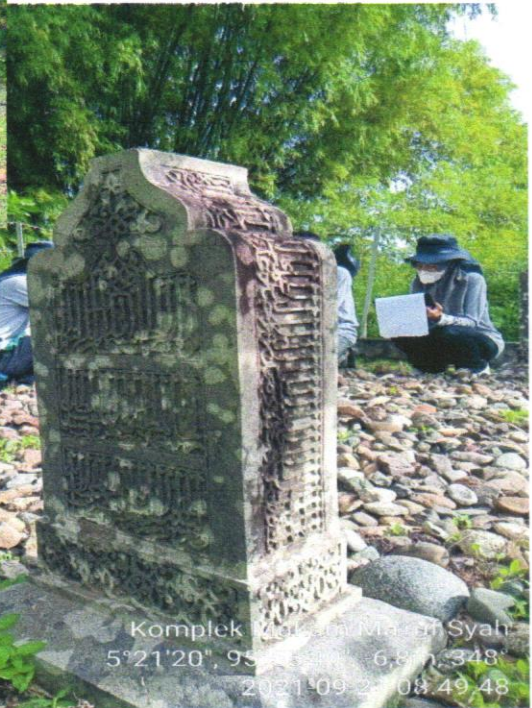
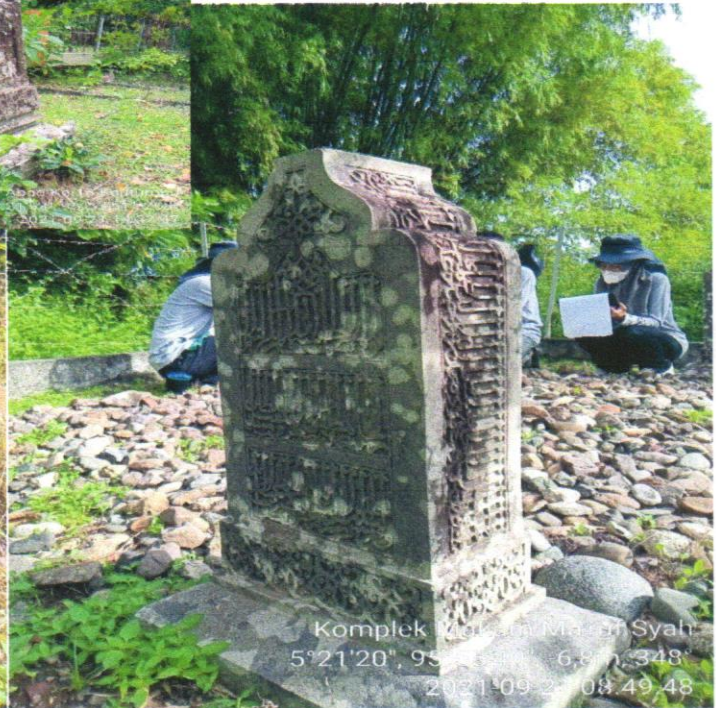


PEMBACAAN HIKAYAT



ADAT SEUMAPA

CAGAR BUDAYA KABUPATEN PIDIE



RUMOH ACEH (RUMAH TRADISIONAL)



GEUDEU- GEUDEU

OLAHRAGA TRADISIONAL KABUPATEN PIDIE





BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI PIDIE
NOMOR : 430/335 /KEP.12/2023

TENTANG

PENETAPAN POKOK-POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH
KABUPATEN PIDIE TAHUN 2023

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

BUPATI PIDIE,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota;

b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pidie tentang Penetapan Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie Nomor 420/113/2023 Tanggal 27 Maret 2023 Perihal Usulan penerbitan SK.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI PIDIE TENTANG PENETAPAN POKOK-
POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN PIDIE
TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah
Kabupaten Pidie sebagaimana tercantum dalam lampiran
keputusan ini;
- KEDUA : Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Pidie
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi
dokumen Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Pidie;
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sigli

Pada tanggal : 30 Maret 2023 M
8 Ramadhan 1444 H

Pj. BUPATI PIDIE, 

WAHYUDI ADISISWANTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PIDIE

Nomor : 430/ 335 /KEP.12/2023

Tanggal : 30 Maret 2023 M
8 Ramadhan 1444 H

POKOK-POKOK KEBUDAYAAN DAERAH
KABUPATEN PIDIE

1. MANUSKRIP
2. TRADISI LISAN
3. ADAT ISTIADAT
4. RITUS
5. PENGETAHUAN TRADISIONAL
6. TEKNOLOGI TRADISIONAL
7. SENI
8. BAHASA
9. PERMAINAN RAKYAT
10. OLAHRAGA TRADISIONAL
11. CAGAR BUDAYA





SAMBUTAN BUPATI PIDIE

Assalamu' Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, dengan Rahmat dan Hidayah-Nya, Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten Pidie, Aceh dapat dirampungkan sebagai hasil kerja riset Tim Penyusun yang terdiri dari unsur pemerintah dan unsur ahli baik dari kalangan akademisi, budayawan, maupun pelaku seni budaya Kabupaten Pidie, yang dikoordinir langsung oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie.

Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah ini, tentunya menjadi langkah kongkrit dari pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah dalam pemajuan kebudayaan daerah dan nasional, setelah ditetapkannya Undang- Undang Nomor 05 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang merupakan amanat pemajuan kebudayaan nasional Indonesia. Oleh karena itu, selaku pemerintah Kabupaten Pidie mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Dirjen Kebudayaan Republik Indonesia

Sesungguhnya, cita-cita luhur yang melandasi lahirnya Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, sangat selaras dengan visi pemerintah Kabupaten Pidie yaitu: “Pidie Berwisata, Pidie Berbudaya”. Visi ini, mengindikasikan bahwa di antara yang menjadi pusat perhatian pembangunan pemerintah Kabupaten Pidie, adalah pembangunan di bidang kebudayaan, baik pada dimensi ekspresi budaya dan tradisi maupun pada dimensi nilai-nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal masyarakat yang dapat memperkuat sikap dan perilaku (karakter) toleransi, kekeluargaan, dan gotong-royong yang sudah mulai terdegradasi di era global dewasa ini.

Disadari sepenuhnya bahwa dengan pengkajian dan penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten Pidie ini, tentu sangat konstruktif untuk mendukung program- program strategis pemajuan bidang kebudayaan yang telah dicanangkan, sehingga ke depannya dapat lebih bersinergi lagi dengan program pemajuan kebudayaan Nasional di Kabupaten Pidie, di mana di antaranya sudah dilaksanakan melalui kegiatan Festival Pedir Raya Festival dan beberapa even- even kebudayaan nasional lainnya.

Sebagai pemerintah, tentu sangat menyambut baik dan menyampaikan ucapan terima kasih serta memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya, baik kepada seluruh Tim Penyusun PPKD maupun kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie beserta jajarannya, sehingga Dokumen PPKD Kabupaten Pidie Tahun 2023 ini dapat diselesaikan sesuai dengan rencana. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para tokoh adat, tokoh masyarakat, pelaku seni, budayawan, dan seluruh komponen masyarakat lainnya, atas peran sertanya dalam membantu memberikan informasi dan mendukung proses penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Pidie.

Dengan tersusunnya PPKD ini, tentunya pemerintah daerah memiliki referensi yang kuat untuk mewujudkan komitmen pemajuan kebudayaan daerah di Kabupaten Pidie, dan semoga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dapat lebih fokus dalam melakukan program pengembangan dan pelestarian di bidang kebudayaan Kabupaten Pidie sehingga mampu menjadikan kebudayaan daerah menjadi kebudayaan yang bertaraf Nasional bahkan Internasional. Dengan demikian, cita- cita untuk menjadikan Pidie sebagai Kota Destinasi dapat diwujudkan.

Sekian dan terima kasih.

“Uteun Tajaga Udeep Wisata Rakyat Seujahtera”

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sigli, Oktober 2023

Pj. BUPATI PIDIE



WAHYUDI ADISISWANTO

KATA PENGANTAR

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PIDIE

Assalamu' Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, dan atas Rahmat dan Ridho-Nya, sehingga Penyusunan Draft Pokok-pokok Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten Pidie, Aceh Tahun 2023 dapat diselesaikan bersama dengan Tim Penyusun. Pencapaian ini tentunya menjadi suatu kebanggaan tersendiri kami bersama Tim penyusun dengan waktu yang sangat singkat dapat merampungkan laporan ini sesuai dengan limit waktu yang ditentukan oleh Dirjen Kebudayaan Kemendikbud. RI. Namun demikian, kami menyadari, draft ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Draft ini sendiri merupakan langkah awal dari proses panjang pemajuan kebudayaan yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017, sehingga kerja-kerja penyusunan terus berjalan dalam setiap tahapan pemajuannya.

Mewakili Tim Penyusun, menyadari bahwa selama dalam proses penyusunan mulai dari pembagian tugas dan tanggung jawab 11 Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK), tahap pengumpulan data melalui wawancara, kajian referensi, kajian dokumen, dan Focus Group Discussion (FGD) untuk saling menopang dalam mempercepat proses pengidentifikasian pokok-pokok pikiran kebudayaan yang tersebar luar dan kompleks di tengah-tengah masyarakat. Meski demikian, tim penyusun telah dapat memenuhi kebutuhan mengidentifikasi pokok-pokok pikiran kebudayaan untuk diinput ke dalam sistem Aplikasi Pemajuan Kebudayaan (APIK) yang selanjutnya ditindak lanjuti dalam penyusunan Draft PPKD.

Kami menyadari, dengan selesainya laporan ini tidak lepas dari bantuan, saran, bimbingan dari berbagai pihak. Pertama sekali kepada Dirjen Kebudayaan yang telah mempercayakan kepada Pemerintah Kabupaten Pidie melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie untuk menyusun Pokok-pokok Pikiran Kebudayaan Daerah. Kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pidie yang tiada hentinya memberikan dukungan dan arahan. Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie yang telah meluangkan waktu khusus untuk ikut dalam mendukung proses penyusunan PPKD dengan memberikan banyak informasi, masukan dan kritikan yang sifatnya konstruktif. Begitu juga kepada tokoh masyarakat, tokoh adat yang sangat baik memberikan informasi kepada tim penyusun, dan bersedia menerima undangan FGD dan berbagi pemikiran di dalam proses tersebut. Dan kepada semua komponen masyarakat yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, kepada

semuanya kami ucapkan terima kasih.

Harapannya ke depan, draft ini terus mengalami penyempurnaan seiring dengan dinamika kebudayaan yang terus bergerak kedepan, penyempurnaan atas draf PPKD ini sedapat mungkin merupakan hasil potret dari dinamika yang berlangsung dalam kondisi kekinian, sehingga setiap perubahan atas pokok- pokok pikiran kebudayaan yang sudah mengalami kemajuan ataupun yang mengalami kemunduran, kondisinya tetap dapat terpantau.

Buku ini sendiri adalah se bentuk borang kebudayaan, yang di dalamnya memaparkan 11 objek pokok pikiran kebudayaan yang ada di Kabupaten Pidie. Paparan yang disajikan dalam draft PPKD ini masih bersifat identifikasi terhadap berbagai jenis pokok pikiran kebudayaan yang sudah tidak ada tetapi pernah ada dalam kehidupan leluhur Suku Aceh di Kabupaten Pidie, yang masih eksis, baik yang bersifat otentik, ataupun yang ada melalui proses kontak-kontak dengan budaya dari luar suku Aceh. Sebagai kajian yang masih bersifat identifikasi dengan tujuan awal untuk mengisi sistem yang telah dibuat khusus oleh tim Dirjen Kebudayaan, maka paparan di dalamnya tentu belum ditemukan analisis yang mendalam. Untuk itu, riset ini tentunya masih perlu dikembangkan melalui kajian yang lebih mendalam nantinya. Dan, tentu saran dan kontribusi positif untuk penyempurnaan draft PPKD ini senantiasa kami harapkan. Kepada seluruh Tim Penyusun, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, atas kerjasama, komitmen, dan upaya yang maksimal dilakukan untuk merampungkan proses penyusunan PPKD Kabupaten Pidie Tahun 2023 ini.

Semoga draft ini bermanfaat dalam pemajuan kebudayaan dan strategi nasional pemajuan kebudayaan dalam rangka mewujudkan Pidie Berwisata Pidie Berbudaya
Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Sigli, Oktober 2023

Kepala Dinas Pendidikan Dan
kebudayaan

Kabupaten Pidie,



Yusmadi, S.Pd., M.Pd
Pembina

NIP. 19680610 199905 1 001



NASKAH DRAFT

POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2023

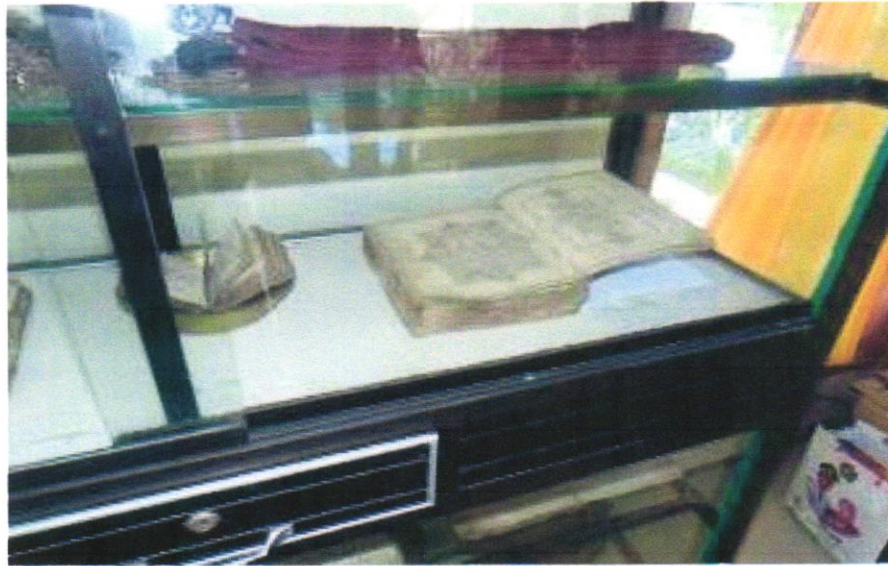
Oleh:

TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN
PIDIE TAHUN 2023

Telah disetujui Oleh: Ditetapkan di
Sigli Pada Tanggal Oktober
2023



MANUSKRIP KABUPATEN PIDIE



KUPIAH RIMAN DAN KUPIAH MEUKEUTOP

PENGETAHUAN TRADISIONAL KABUPATEN PIDIE



KUPIAH RIMAN



KUPIAH MEUKEUTOP

PENGHARGAAN TARI SEUDATI SEBAGAI WARISAN BUDAYA TAKBENDA



PENGHARGAAN KOPIAH RIMAN SEBAGAI WARISAN BUDAYA TAKBENDA



**PENGHARGAAN KUPIAH MEUKUTOB SEBAGAI WARISAN BUDAYA
TAKBENDA PADA TAHUN 2021**



**PENGHARGAAN KULINER TRADISIONAL APAM SEBAGAI WARISAN
BUDAYA TAKBENDA PADA TAHUN 2022**



GASENG DAN CATOE ACEH

PERMAINAN TRADISIONAL KABUPATEN PIDIE



Permainan Gaseng



Permainan Catoe Aceh

RAPAI GRIMPHENG SENI
BUDAYA DAERAH PIDIE

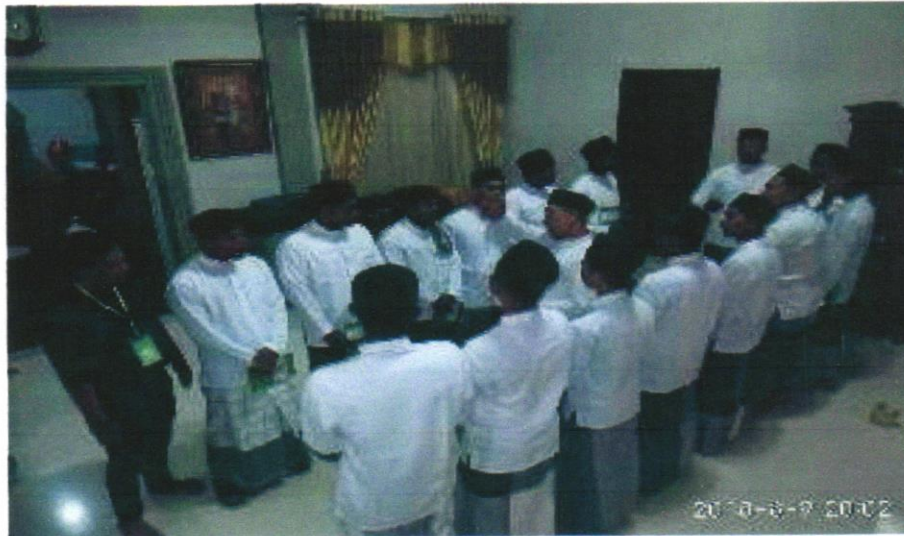


RAPAT TIM PENYUSUN POKOK-POKOK PIKIRAN
KEBUDAYAAN
DAERAH KABUPATEN PIDIE

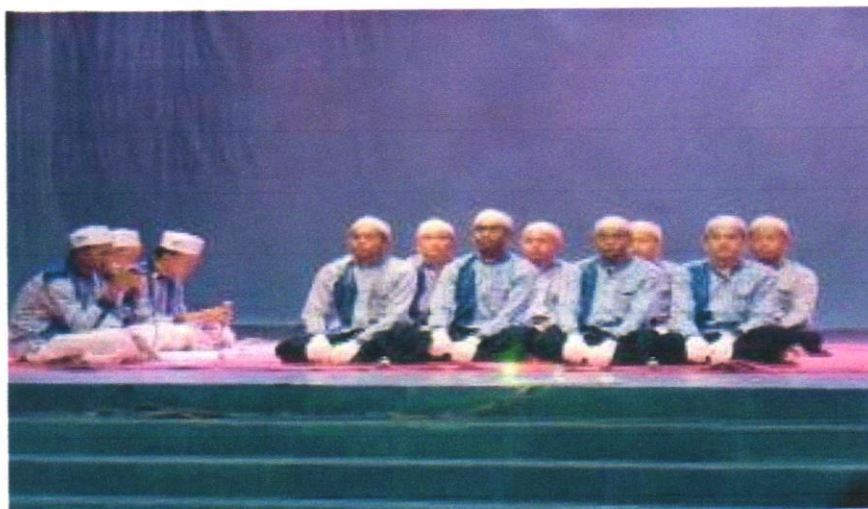


RITUS

KABUPATEN PIDIE



MEURUKON (MEMBACA ASMAUL HUSNA)



ZIKIR MAULID (MEMBACA SELAWAT NABI MUHAMMAD S.A.W)

TARI LAWEUT

SENI BUDAYA DAERAH PIDIE



TARI SEUDATI
SENI BUDAYA DAERAH PIDIE



TARIAN MEUGROEP

SENI BUDAYA DAERAH PIDIE



JEUNGKI, CREUH DAN KROONG

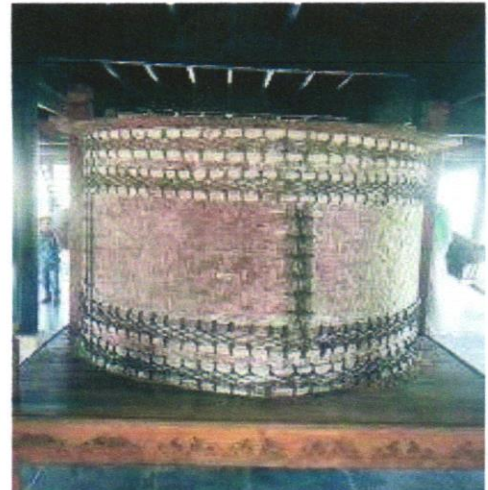
TEKNOLOGI TRADISIONAL KABUPATEN PIDIE



Jeungki
(Alat penumbuk)



Creuh
(Alat membajak di sawah)



KROONG PADE
(Tempat penyimpan padi)



BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI PIDIE
NOMOR : 430/~~362~~/KEP.13/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN POKOK-POKOK PIKIRAN
KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2023

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

BUPATI PIDIE

- Menimbang : a. bahwa untuk tercapainya pemajuan kebudayaan melalui penyusunan Pokok-pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Pidie, dipandang perlu dibentuk Tim;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kemajuan Kebudayaan, Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan di kabupaten/kota dan ayat (4) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pidie tentang Pembentukan Tim Penyusun Pokok-pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
7. Peraturan presiden republik indonesia nomor 55 tahun 2018 tentang tata cara peiyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah dan strategi kebudayaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Alam di Museum;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023;
11. Qanun Pemerintah Aceh Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat;
12. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2020;
13. Peraturan Bupati Pidie Nomor 62 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie;

Memperhatikan: Surat kepala Dinas pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pidie nomor 420/895/2023 tanggal 10 Maret 2023 perihal Usulan Penerbitan SK;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI PIDIE TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN POKOK-POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Pokok-pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2023, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun Pokok-pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten Pidie dan bertanggung jawab kepada Bupati Pidie melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie;
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Sigli

Pada tanggal : 13 Maret 2023 M

21 Sya'ban 1444 H

Pj. BUPATI PIDIE

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PIDIE
 Nomor : 430/ ~~362~~/KEP.13/2023
 Tanggal : 13 Maret 2023 M
 21 Sya'ban 1444 H

DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN POKOK-POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN
 DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN/ KEAHLIAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Ir. Wahyudi Adisiswanto, M. Si	Pj Bupati Pidie	Pembina	
2.	Idhami, S. Sos, M. Si	Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie	Pembina	
3.	Drs. Samsul Azhar	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Pidie	Pengarah	
4.	Isnaini, ST, M. Si	Kepala BAPEDDA Kab. Pidie	Pengarah	
5.	Yusmadi, S. Pd, M. Pd	Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pidie	Ketua	
6.	Malia Safriani, S.Pd, M.Pd	Sekdis Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pidie	Wakil Ketua	
7.	Mahdiana, S.Pd	Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pidie	Sekretaris	
8.	Teuku Hendra	Kepala BPKK Pidie	Anggota	
9.	Dra. Mardaini	Kabid Perindustrian Disperindagkop Kab. Pidie	Anggota	
10.	H. Bukhari Tahir	MPD Kab. Pidie	Anggota	
11.	Tgk H. Athailah	Ketua MAA Kab. Pidie	Anggota	
12.	Junaidi Ahmad	Budayawan	Anggota	
13.	Muhajir	Pemerhati Cagar Budaya	Anggota	
14.	Aris Munandar	Ketua DKA Pidie	Anggota	
15.	Drs. Sufyan, M.Pd	Pengelola Data Kesenian dan Perfilman	Anggota	
16.	Rahmat, S.Pdi	Penggiat Budaya Kabupaten Pidie	Anggota	
17.	Khalid Muttaqin	Komunitas Beulangong Tanoh (komunitas budaya)	Anggota	
18.	Iwan	Sanggar Seni Pusaka Nanggroe	Anggota	

Pj. BUPATI PIDIE